

BerAKHLAK

#bangga
melayani
bangsa

2025



LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

**KAPANEWON GEDANGSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Jalan Ngalang KM 5 Gedangsari, Gunungkidul 55863
Telepon 08112575390

e-mail : gedangsari@gunungkidulkab.co.id
Website: gedangsari.gunungkidulkab.co.id



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kapanewon Gedangsari Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. LKjIP Kapanewon Gedangsari Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah.

Akuntabilitas kinerja merupakan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik. Dalam hubungan ini, diperlukan evaluasi kinerja yang baik untuk mengetahui sejauh mana pencapaian hasil bisa optimal serta cara-cara yang digunakan untuk mencapainya.

Akuntabilitas dalam bentuk laporan dapat mengekspresikan pencapaian tujuan melalui pengelolaan sumber daya suatu organisasi karena pencapaian suatu tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi yang akan terlihat jelas pada pencapaian sasaran.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.



Gedangsari, 31 Januari 2026

KAPANEWON
GEDANGSARI

Eko Krisdiyanto, SE

NIP. 197506301995031001



RINGKASAN EKSEKUTIF

Capaian kinerja Kapanewon Gedangsari tahun 2025 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Capaian Tujuan “Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan kapanewon yang berkualitas”

Tujuan “Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan kapanewon yang berkualitas” diukur dengan indikator kinerja Indeks Pelayanan Kapanewon. Dengan target Indeks Pelayanan Kapanewon Tahun 2026 sebesar 81,25 dan capaian di tahun 2025 sebesar 84,39 maka tujuan sudah tercapai 103,86 persen.

2. Capaian Tujuan “Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan”.

Tujuan “Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan” diukur dengan indikator kinerja jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan. Target jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan tahun 2025 sejumlah 2 potensi budaya dan capaian di tahun 2025 sejumlah 2 potensi budaya, maka tujuan sudah tercapai 100 persen.

3. Capaian sasaran strategis 1 “Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan”:

- Diukur dengan indikator Indeks Pelayanan Kapanewon.
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 5 (lima) Program, yakni Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan, Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, dan Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.



- Target capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar 81,00 sampai dengan bulan Desember 2025 terealisasi 84,39. Dengan demikian capaian ini sudah mencapai target. Persentase realisasi terhadap target mencapai 104,18%.
 - Dibandingkan dengan capaian target tahun 2024 sebesar 82,48 terjadi peningkatan sebesar 1,91.
4. Capaian sasaran strategis 2 “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah”:
- Diukur dengan indikator Nilai AKIP Perangkat Daerah.
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar 80,08; sampai dengan akhir Bulan Desember 2025 terealisasi 81,44. Dengan demikian kinerja Kapanewon Gedangsari Kabupaten Gunungkidul sudah mencapai target. Persentase realisasi terhadap target mencapai 101,70%.
 - Dibandingkan dengan capaian tahun 2024 sebesar 80,89 terjadi peningkatan sebesar 0,55.
5. Capaian sasaran strategis 3 “Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan”:
- Diukur dengan indikator Jumlah Potensi Budaya Lokal yang Dilestarikan.
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja Program Penyelenggaran Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.
 - Target capaian indikator sasaran tahun 2025 sebesar 100%; sampai dengan akhir Bulan Desember 2025 terealisasi 100%. Dengan demikian kinerja Kapanewon Gedangsari Kabupaten Gunungkidul telah mencapai target. Persentase realisasi terhadap target mencapai 100%.



- Capaian target tahun 2024 sama seperti capaian target tahun 2025 yaitu sebesar 100%.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Kapanewon Gedangsari Kabupaten Gunungkidul ke depan, sebagai berikut:

1. Walaupun IKU telah tercapai dengan kategori sangat baik, persoalan-persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik. Tantangan-tantangan ini terutama nampak dalam kondisi terkait dengan persoalan Sumber Daya Manusia, infrastruktur, pemenuhan kebutuhan air bersih dan kemiskinan;
2. Pentingnya koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam pencapaian sasaran, sebab tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-sungguh dan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi berbagai pihak ini, upaya-upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai;
3. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna apabila hanya berhenti pada laporan saja, tetapi hasil evaluasi capaian kinerja bisa digunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang agar LKjIP benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I <u>P</u> ENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Cascading Kinerja Sebagai Dasar Pembentukan Perangkat Daerah	2
C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi	4
D. Tugas dan Fungsi	6
E. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issued</i>).....	8
F. Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran	9
BAB II <u>P</u> ERENCANAAN KINERJA.....	13
A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah	13
B. Strategi dan Arah Kebijakan	14
C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025.....	16
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	20
E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja	22
BAB III <u>A</u> KUNTABILITAS KINERJA	25
A. Capaian Kinerja Tahun 2025	25
B. Capaian Kinerja Lainnya	44
C. Realisasi Anggaran	47
D. Inovasi.....	49
BAB IV PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Langkah Perbaikan Kinerja	51
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi.....	9
Tabel I.2	Sarana-Prasarana.....	10
Tabel I.3	Anggaran Tahun 2025.....	12
Tabel II.1	Sasaran Strategis Kapanewon Gedangsari, 2021-2026.....	14
Tabel II.2	Strategi dan Arah Kebijakan.....	14
Tabel II.3	Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025.....	16
Tabel II.4	Perjanjian Kinerja Kapanewon Gedangsari Tahun 2025.....	21
Tabel II.5	Anggaran Pada Perubahan Perjanjian Kinerja Kapanewon Gedangsari Tahun 2025.....	22
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja.....	26
Tabel III.2	Capaian Indikator Kinerja Tahun 2025.....	26
Tabel III.3	Rumusan Pengukuran Kinerja Indikator.....	28
Tabel III.4	Capaian Kualitas Penyelenggara Pemerintahan.....	30
Tabel III.5	Pengukuran Capaian Sasaran.....	32
Tabel III.6	Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023-2025 serta perbandingan dengan target akhir Renstra di tahun 2026.....	34
Tabel III.7	Evaluasi Pencapaian Kinerja Program Pelayanan.....	35
Tabel III.8	Efisiensi Penggunaan Sumberdaya Pelayanan Kapanewon.....	36
Tabel III.9	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Nilai AKIP.....	37
Tabel III.10	Evaluasi Pencapaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.....	38
Tabel III.11	Tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi SAKIP Tahun 2024.....	38
Tabel III.12	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023-2025.....	39
Tabel III.13	Evaluasi Pencapaian Kinerja Program AKIP.....	40
Tabel III.14	Efisiensi Penggunaan SDM AKIP.....	40
Tabel III.15	Capaian Sasaran Pelestarian Budaya.....	42
Tabel III.16	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023-2025.....	42
Tabel III.17	Evaluasi Pencapaian Program Pelestarian Budaya.....	43
Tabel III.18	Efisiensi Penggunaan SDM Pelestarian Budaya.....	43
Tabel III.19	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan.....	47



DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1. Cascading Kinerja	3
Gambar I.2. Mandat Kinerja Peta Proses Bisnis dan Struktur Kapanewon Gedangsari	5
Gambar II.1. SIPD	23
Gambar II.2. Sim Aset	23
Gambar II.3. Persediaan	24
Gambar II.2. SIPANDA.....	24
Gambar III.1 Musyawarah Kalurahan dalam Menyusun RKPKal dan APBKal .	30
Gambar III.2 Pembagian Bansos Droning Air Kapanewon Gedangsari.....	31
Gambar III.3 Penyerahan Bantuan Sosial Jamban	31
Gambar III.4 Rapat Koordinasi Pembinaan dan Ketentaman dan Ketertiban ...	32
Gambar III.5 Ruang Pelayanan.....	33
Gambar III.6 Partisipasi perempuan dalam pentas Gelar Budaya	45
Gambar III.7 Partisipasi perempuan dalam distribusi bantuan air bersih	45
Gambar III.8 Partisipasi perempuan dalam Paskibra	46
Gambar III.9 Partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan	46



BAB I berisi:

- A. Latar Belakang
- B. Cascading Kinerja Sebagai Dasar Pembentukan Perangkat Daerah
- C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi
- D. Tugas dan Fungsi
- E. Permasalahan Utama (Isu Strategis)
- F. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 94 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Setiap Perangkat Daerah wajib menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik setiap akhir tahun anggaran.



Tujuan penyusunan LKjIP adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

LKjIP dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan. LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja, dan alat pendorong terwujudnya *good governance* serta berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

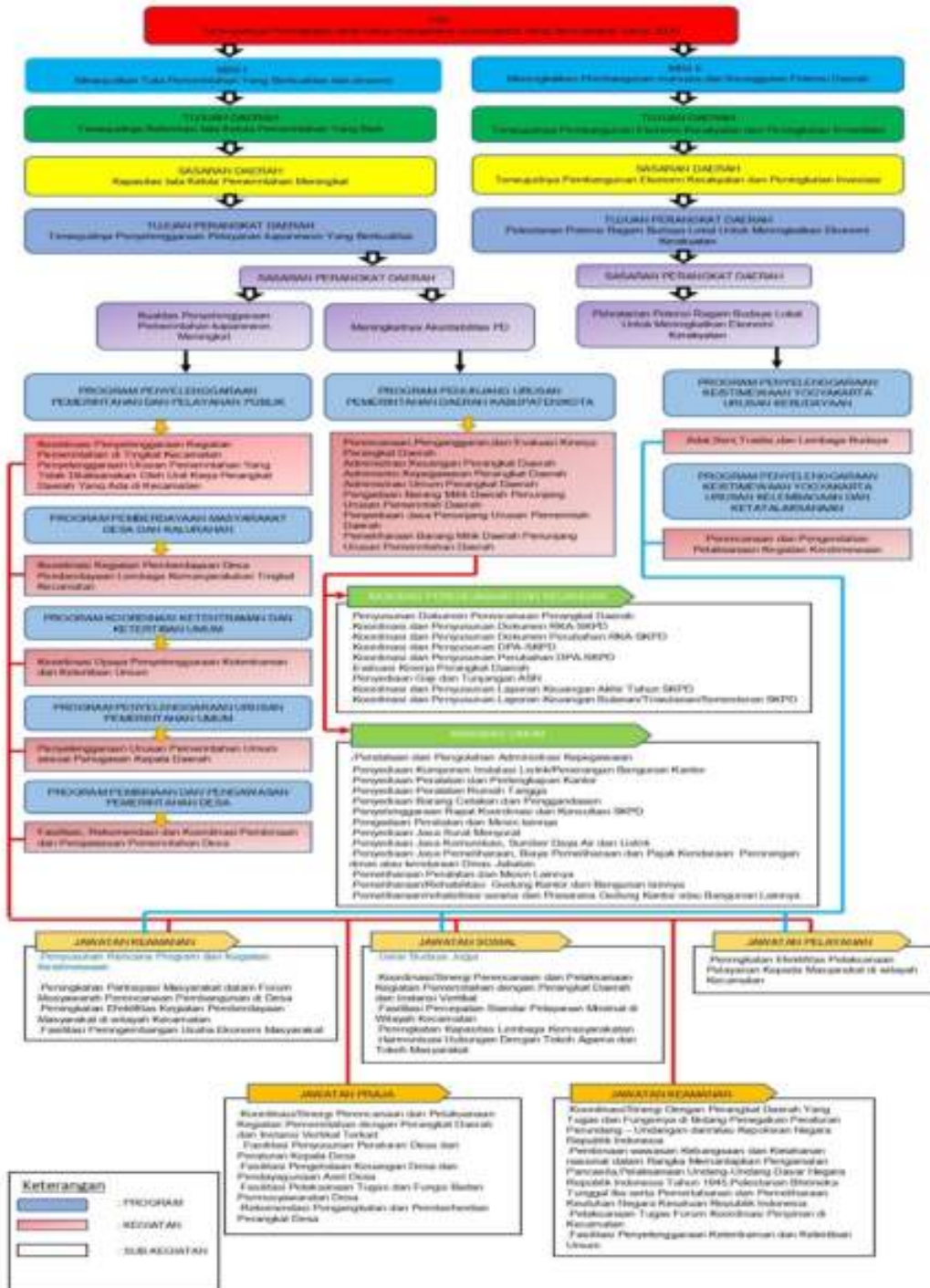
Bertitik tolak dari Renstra Kapanewon Gedangsari Tahun 2021-2026 dan Rencana Kinerja Tahunan 2025, maka LKjIP Kapanewon Gedangsari yang disusun merupakan realisasi hasil kegiatan tahun 2025 dan menyajikan laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintahan.

B. Cascading Kinerja Sebagai Dasar Pembentukan Perangkat Daerah

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (Performance Based Organization) yang diterapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2021 – 2026. Kapanewon Gedangsari dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:



CASCADING KAPANEWON GEDANGSARI



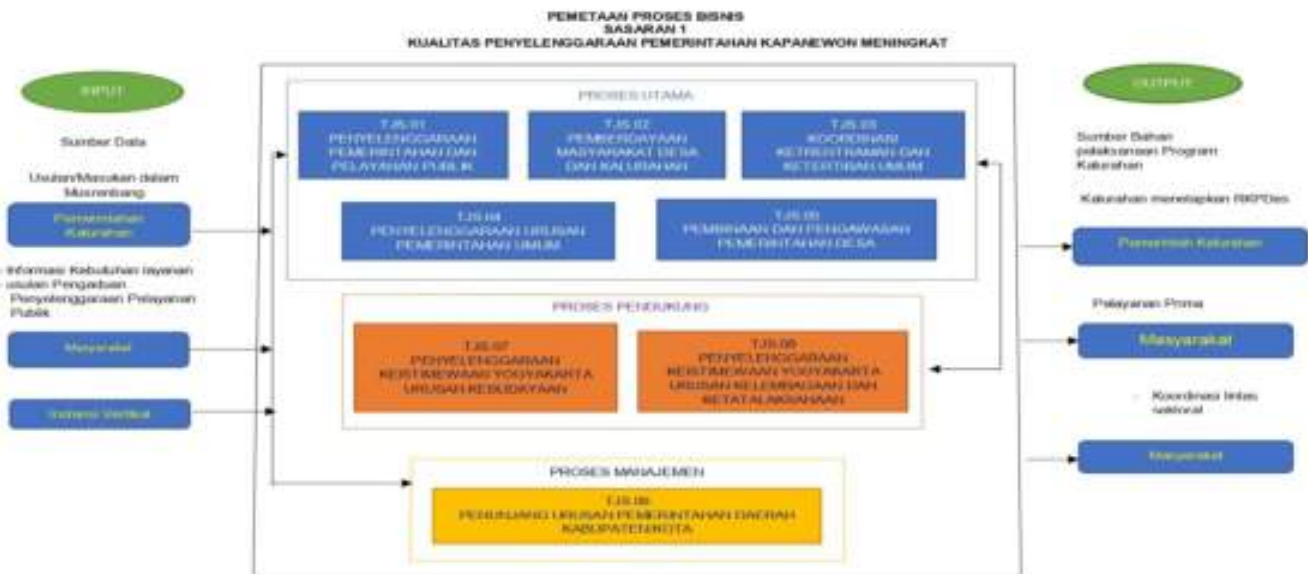
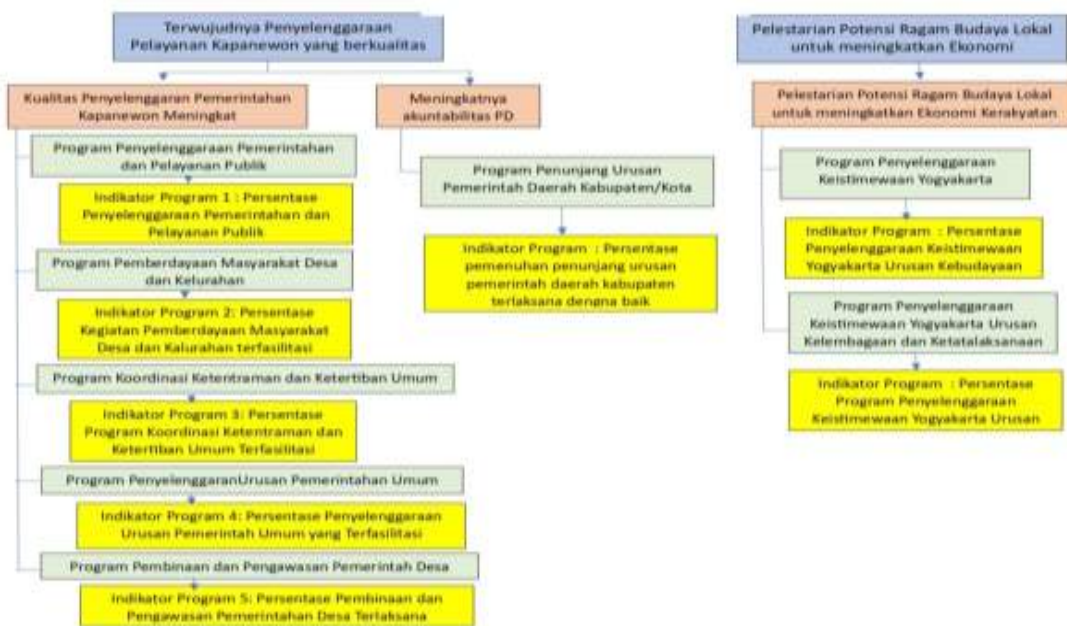
Gambar I.1. Cascading Kinerja



C. Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

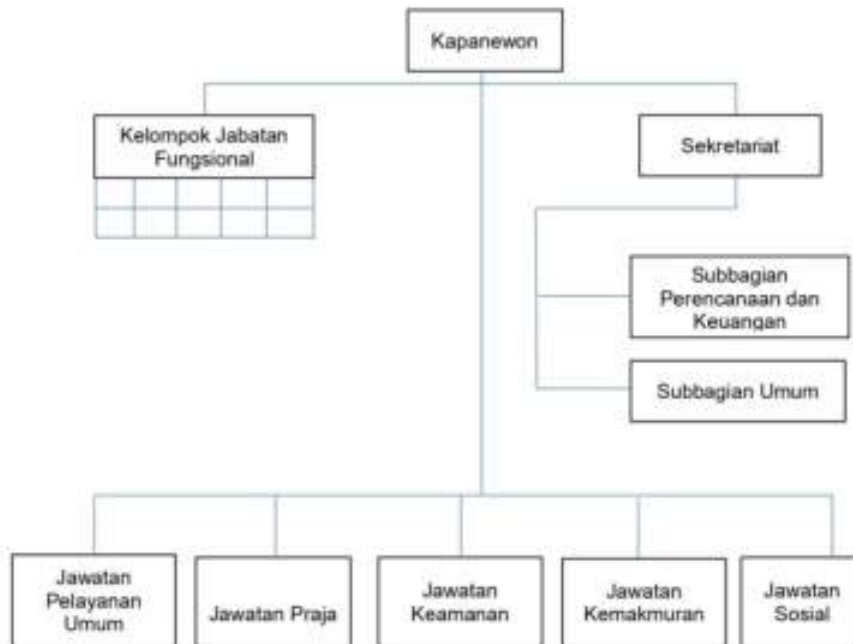
Hubungan antara mandat kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Kapanewon Gedangsari sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:

Mandat Kinerja Kapanewon Gedangsari





Struktur Organisasi Kapanewon Gedangsari



Gambar I.2.Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Kapanewon Gedangsari

Struktur organisasi Kapanewon terdiri dari:

- a. Unsur Pimpinan : Panewu;

Kapanewon dipimpin oleh Panewu yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat, yang terdiri dari :

1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
2. Subbagian Umum;

Sekretariat dipimpin oleh seorang Panewu Anom yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu.

Subbagian-Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu Anom.

- c. Unsur Pelaksana terdiri dari:



1. Jawatan Praja

Jawatan Praja dipimpin oleh seorang Kepala Jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab Panweu

2. Jawatan Keamanan

Jawatan keamanan dipimpin oleh seorang Kepala Jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu.

3. Jawatan Kemakmuran.

Jawatan Kemakmuran dipimpin oleh seorang Kepala Jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu.

4. Jawatan Sosial

Jawatan sosial dipimpin oleh seorang Kepala Jawatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Panewu

5. Jawatan Pelayanan Umum .

Jawatan Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Jawatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Panewu.

d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

D. Tugas dan Fungsi

Kapanewon Gedangsari dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2025. Adapun tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi



kapanewon diatur dalam Peraturan Gunungkidul Nomor Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kapanewon

1. Tugas Pokok

Kapanewon mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan di kalurahan pada wilayah kapanewon.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Kapanewon mempunyai fungsi sebagai berikut

- a. Perumusan kebijakan umum di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- c. Penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- f. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- g. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dan sarana pelayanan umum;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di wilayah Kapanewon;
- i. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa yang juga dimaknai sebagai kalurahan;



- j. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kapanewon;
- k. Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi wewenang Kapanewon;
- l. Penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- m. Koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- n. Penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan;
- o. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan.

E. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Diuraikan secara ringkas permasalahan utama yang sedang dihadapi oleh Kapanewon Gedangsari pada tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Sumberdaya Manusia (SDM). Kuantitas dan kualitas SDM Kapanewon Gedangsari perlu ditingkatkan. Jumlah pegawai Kapanewon Gedangsari perlu ditingkatkan. Jumlah pegawai sangat terbatas bila dibandingkan beban pekerjaan yang harus diselesaikan sehingga pelayanan belum optimal.
2. Alokasi anggaran yang terbatas sehingga kurang optimal dalam pelayanan kepada masyarakat.
3. Ruang perkantoran Kapanewon Gedangsari yang kurang representatif.



4. Masih banyak warga yang mengajukan permohonan (KIS) Kartu Indonesia Sehat, sehingga direkomendasikan agar anggaran ditambah.
5. Perekaman E-KTP belum maksimal sehingga dilakukan secara jempot bola hal tersebut dikarenakan kesadaran masyarakat kurang sehingga diperlukan pembinaan di semua elemen masyarakat.

F. Dukungan SDM, Sarana, Prasarana dan Anggaran

Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran pada tahun 2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.1 Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

No	Jabatan	Formasi					Pegawai yang ada					Jenis Kelamin					
		Jml	Kualifikasi					Jml	Kualifikasi					Laki	Peremp		
1	2	3	4					5	6	7					8	9	10
			S2	S1	D3	SMA	SMP		S2	S1	D3	SMA	SMP				
A.	Jabatan Pimpinan Tinggi	0															
B.	Jabatan Administrasi																
	1. Administrator	2		2				2		2					2		
	2. Pengawas	7		7				5		5					3	2	
	3. Pelaksana	11			2	6	3	11			2	6	3		9	2	
C.	Jabatan Fungsional Umum																
	Jumlah	20		9	2	6	3	18		7	2	6	3		14	4	

Sumber: Data Kepegawaian Kapanewon Gedangsari Desember 2025

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Kapanewon Gedangsari antara laki-laki dan perempuan terdiri dari jenjang pendidikan S1 sebanyak 7 orang (39%), disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 0 orang (0%), D3 2 orang (11%), SLTA 6 orang (33%), SMP 3 orang (17%). Komposisi pegawai perempuan lebih sedikit dibanding pegawai laki-laki tapi ada 2 jabatan struktural dijabat perempuan. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.



Masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 16 orang pelaksana administratif. Terdapat 1 orang pegawai yang tidak memenuhi kualifikasi jabatan pada jabatan pelaksana substantif, 1 orang tidak kompeten melaksanakan tugas dalam jabatan pelaksana substantif.

Tabel I.2 Sarana-Prasarana

No	Klasifikasi	Jumlah Barang	Nilai Aset (Rp)*
	Aset Tetap		
1	Alat-alat Angkutan	11 unit	359.045.300,00
2	Alat Bengkel dan alat ukur	2 unit	15.670.000,00
3	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	436 unit	308.638.522,28
4	Alat-alat Studio dan Komunikasi	10 unit	39.750.000,00
5	Alat kedokteran dan kesehatan	1 unit	485.000,00
6	Alat Laboratorium	1 unit	784.000,00
7	Komputer	38 unit	210.730.271,00
8	Bangunan Gedung	10 unit	1.126.000.500,00
9	Tugu titik control	3 unit	194.028.000,00
10	Bangunan air	1 unit	10.800.000,00
11	Jaringan	2 unit	19.770.000,00
1	Aset Tetap Lainnya	30 Barang	14.983.000,00
2	Aset lain-lain	7 unit	3.110.000,00
	Jumlah		2.303.794.593,28

Sumber: Data Neraca 31 Desember 2025

Kendaraan dinas terdiri dari yakni 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan, dan 10 (sepuluh) unit kendaraan roda dua. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang musholla, ruang gudang, ruang tunggu, dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio personal computer/laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 1:1. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah memadai.

Fasilitas penunjang juga disediakan untuk dapat memberikan layanan tempat, keamanan, serta kenyamanan kepada masyarakat, dengan akses yang mudah dan perlakuan yang sama, tidak diskriminatif, dan ada perlakuan khusus bagi kelompok berkebutuhan khusus sebagaimana yang diatur dalam SE Menteri PANRB nomor 66 Tahun 2020 tentang Penyediaan



Sarana dan Prasarana Bagi Kelompok Rentan dalam Penyelenggaraan Publik.

- a. Ruang laktasi berukuran 6 meter persegi, yang bersih, nyaman dan aman serta dilengkapi dengan meja kursi, ruang tertutup dengan gordena, lantai kramik, memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang baik, bebas dari polusi, lingkungan tenang dan jauh dari kebisingan, penerangan cukup, memiliki pintu yang bisa dikunci, tempat sampah, air mineral, hand sanitizer dan tisu.
- b. Bangunan ramah disabilitas Kantor Kapanewon Gedangsari telah dilengkapi fasilitas yang ramah disabilitas dengan:
 - Pintu masuk yang mudah diakses, dilengkapi dengan ramp dan pegangan rambat.
 - Ruang tunggu dengan tempat duduk prioritas bagi pengguna layanan kelompok rentan
- c. Halaman luas yang dapat digunakan sebagai arena bermain anak maupun untuk parkir khusus yang mudah diakses.
- d. Kawasan tanpa rokok dengan menyediakan area merokok di luar ruang pelayanan.
- e. Sarana dan prasarana konsultasi dan pengaduan.
- f. Penyediaan fasilitas sanitasi sebagai upaya menjaga kebersihan dan kesehatan.



Tabel I.3 Anggaran Tahun 2025

Kode Rekening			Uraian	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
4			PENDAPATAN DAERAH			
4	1		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Rp 0	0	0
4	1	02	Retribusi Daerah	Rp 0	0	0
Jumlah Pendapatan				Rp 0	0	0
5			BELANJA DAERAH			
5	1		BELANJA OPERASI	Rp2.411.932.448	2.159.771.162	252.161.286
5	1	01	Belanja Pegawai	Rp1.298.318.378	1.148.541.092	149.777.286
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	Rp739.614.070	637.230.070	102.384.000
5	1	06	Belanja Bantuan Sosial	Rp. 374.000.000	374.000.000	0
5	2		BELANJA MODAL	Rp. 31.300.000	31.300.000	0
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp. 31.300.000	31.300.000	0
5	2	03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp. 0	0	0
5	2	05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp. 0	0	0
Jumlah Belanja				Rp. 2.443.232.448	2.191.071.162	252.161.286
Total Surplus/(Defisit)				(Rp 2.443.232.448)	(2.191.071.162)	(252.161.286)
6			PEMBIAYAAN DAERAH			
Jumlah Penerimaan Pembiayaan				Rp. 0	0	0
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan				Rp. 0	0	0
Pembiayaan Neto				Rp. 0	0	0

Sumber data: Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Kapanewon Gedangsari Tahun 2025

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kapanewon Gedangsari berasal dari APBD Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul. Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2025 Anggaran Kapanewon Gedangsari semula Rp 2.443.232.448,00 dan mengalami perubahan menjadi Rp 2.191.071.162,00 atau bertambah Rp 252.161.286,00. Perubahan anggaran Tahun 2025 merupakan cerminan dukungan Kapanewon Gedangsari dalam bentuk refocusing dan realokasi anggaran dilakukan sebagai bentuk efisiensi.



BAB II berisi:

- A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah
- B. Strategi dan Arah Kebijakan
- C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025
- D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gunungkidul merupakan alat perencanaan pembangunan jangka menengah yang menjadi tolok ukur kinerja daerah dalam melaksanakan amanat yang telah diberikan oleh masyarakat Kabupaten Gunungkidul. Selanjutnya RPJMD tersebut dijabarkan dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah sebagai dokumen teknis operasional.

A. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Sesuai *cascade* kinerja, Kapanewon Gedangsari mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan yang didukung oleh program sinergitas tata kelola pemerintahan. Terkait hal tersebut tujuan jangka menengah Kapanewon Gedangsari selama lima tahun adalah:

“Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas” dan

“Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan”

Adapun sasaran Kapanewon Gedangsari dalam waktu lima tahun sebagai berikut:



Tabel II.1 Sasaran Strategis Kapanewon Gedangsari, 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Indeks pelayanan kapanewon	80.25	80.50	80.75	81.00	81.25
		Meningkatnya akuntabilitas PD	Nilai AKIP PD	A (80,00)	A (80,06)	A (80,07)	A (80,08)	A (80,09)
2	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	2	2	2	2	2

B. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah, diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Peningkatan kualitas pelayanan kapanewon	Meningkatkan kualitas pelayanan sesuai standar pelayanan prima



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan kalurahan	Meningkatkan kapasitas pemerintah dan pemberdayaan masyarakat kalurahan
		Peningkatan kapasitas kalurahan dalam kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana serta gangguan keamanan dan ketertiban	Meningkatkan kapasitas kalurahan dalam kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana serta gangguan keamanan dan ketertiban
	Meningkatnya akuntabilitas PD	Mengarahkan dan mengkoordinasikan seluruh unit kerja bekerja sesuai SOP	Meningkatkan koordinasi penunjang urusan PD
Tujuan 2: Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan ragam budaya lokal	Pemanfaatan ragam budaya lokal pada event budaya



C. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2025

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Kapanewon Gedangsari tahun 2025 maupun program dan kegiatan pendukung sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.3. Struktur Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2025

Sasaran Perangkat Daerah	Kode Program, Kegiatan, dan Subkegiatan					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	2	22	08			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	60.000.000	30.000.000	(30.000.000)
	2	22	08	5.07		Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	60.000.000	30.000.000	(30.000.000)
	2	22	08	5.07	06	Gelar Budaya Jogja	60.000.000	30.000.000	(30.000.000)
	7	01	04			PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	40.000.000	29.560.000	(10.440.000)
	7	01	04	5.06		Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	40.000.000	29.560.000	(10.440.000)
	7	01	04	5.06	01	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	40.000.000	29.560.000	(10.440.000)
Meningkatnya akuntabilitas PD	7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.582.817.348	1.423.091.062	(159.726.286)
	7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.652.700	11.942.700	(3.710.000)
	7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.388.800	3.948.800	(1.440.000)
	7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.023.000	673.000	(350.000)
	7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.005.000	655.000	(350.000)
	7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.154.000	1.154.000	0,00
	7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	923.000	643.000	(280.000)
	7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2.899.000	2.449.000	(450.000)
	7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.259.900	2.419.900	(840.000)

**LAPORAN KINERJA
KAPANEWON GEDANGSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**



Sasaran Perangkat Daerah	Kode Program, Kegiatan, dan Subkegiatan					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
	7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.307.942.478	1.157.375.192	(150.567.286)
	7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.298.318.378	1.148.541.092	(149.777.286)
	7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.204.100	1.204.100	0,00
	7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	8.420.000	7.630.000	(790.000)
	7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.224.800	3.224.800	0,00
	7	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3.224.800	3.224.800	0,00
	7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	61.640.500	55.991.500	(5.649.000)
	7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000	2.000.000	0,00
	7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45.406.500	42.320.500	(3.086.000)
	7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.400.000	3.400.000	0,00
	7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	2.274.000	2.011.000	(263.000)
	7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.200.000	1.200.000	0,00
	7	01	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	2.160.000	2.160.000	0,00
	7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.200.000	2.900.000	(2.300.000)
	7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.300.000	7.300.000	0,00
	7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.300.000	7.300.000	0,00
	7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.945.920	25.945.920	0,00
	7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.345.920	25.345.920	0,00
	7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	600.000	600.000	0,00
	7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	161.110.950	161.310.950	200.000,00

**LAPORAN KINERJA
KAPANEWON GEDANGSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**



Sasaran Perangkat Daerah	Kode Program, Kegiatan, dan Subkegiatan					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
	7	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	35.900.000	35.900.000	0,00
	7	01	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	10.200.000	10.200.000	0
	7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	113.210.950	113.410.950	200.000
	7	01	01	2.09	010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1.800.000	1.800.000	0
Kualitas penyelenggaraan Pemerintahan kapanewon meningkat	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	52.251.000	42.911.000	(9.340.000)
	7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	14.281.000	5.391.000	(8.890.000)
	7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	14.281.000	5.391.000	(8.890.000)
	7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	37.970.000	37.520.000	(450.000)
	7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	37.970.000	37.520.000	(450.000)
Kualitas penyelenggaraan Pemerintahan kapanewon meningkat	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	75.222.500	64.692.500	(10.530.000)
	7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	50.952.500	43.262.500	(7.690.000)
	7	01	03	2.01	02	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	39.152.500	32.862.500	(6.290.000)
	7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan			
	7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	11.800.000	10.400.000	(1.400.000)
	7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	24.270.000	21.430.000	(2.840.000)
	7	01	03	2.03	04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	11.260.000	11.260.000	0

**LAPORAN KINERJA
KAPANEWON GEDANGSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025**



Sasaran Perangkat Daerah	Kode Program, Kegiatan, dan Subkegiatan					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
Kualitas penyelenggaraan Pemerintahan kapanewon meningkat	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	21.588.900	19.548.900	(2.040.000)
	7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	21.588.900	19.548.900	(2.040.000)
	7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	7.078.900	6.798.900	(280.000)
	7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	14.510.000	12.750.000	(1.760.000)
	7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	99.992.900	85.992.900	(14.000.000)
Kualitas penyelenggaraan Pemerintahan kapanewon meningkat	7	1	5	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	99.992.900	85.992.900	(14.000.000)
	7	1	5	2.01	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	89.882.900	77.512.900	(12.370.000)
	7	1	5	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	10.110.000	8.480.000	(1.630.000)
	7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	511.359.800	495.274.800	(16.085.000)
Kualitas penyelenggaraan Pemerintahan kapanewon meningkat	7	1	6	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	511.359.800	495.274.800	(16.085.000)
	7	1	6	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	511.359.800	495.274.800	(16.085.000)
	7	1	6	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	3.425.000	2.975.000	(450.000)



Sasaran Perangkat Daerah	Kode Program, Kegiatan, dan Subkegiatan					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sebelum Perubahan (Rp)	Setelah Perubahan (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
	7	1	6	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	3.440.000	3.160.000	(280.000)
	7	1	6	2.01	05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	3.240.000	2.290.000	(950.000)
	7	1	6	2.01	06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	6.995.000	0	(6.995.000)
	7	1	6	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1.130.000	770.000	(360.000)
	7	1	6	2.01	08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2.040.000	1.620.000	(420.000)
	7	1	6	2.01	09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan	464.690.000	461.210.000	(3.480.000)
	7	1	6	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.696.800	4.696.800	0
Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran							2.443.232.448	2.191.071.162	(252.161.286)

Sumber: Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran Kapanewon Gedangsari Tahun 2025

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 merupakan suatu dokumen kontrak kinerja antara Kepala Kapanewon Gedangsari dengan Bupati Gunungkidul untuk mewujudkan target kinerja tahun pertama dari Renstra Kapanewon Gedangsari Tahun 2021-2026 berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Kapanewon Gedangsari. Perjanjian Kinerja Tahun 2025 mencerminkan rencana kegiatan, program, dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kapanewon Gedangsari Tahun 2021-2026. Pada dasarnya perjanjian kinerja Tahun 2025 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai Kapanewon Gedangsari selama Tahun 2025. Target kinerja merepresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama Tahun 2025 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat kegiatan maupun sasaran tahunan. Target kinerja pada tingkat



sasaran akan dijadikan tolok ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian tujuannya.

Dokumen Perjanjian Kinerja Kapanewon Gedangsari Tahun 2025 disusun setelah diterimanya Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2025. Kapanewon Gedangsari melaksanakan perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 seiring dengan perubahan DPA atau DPPA Nomor DPPA/B.1/7.01.0.00.0.00.15.0000/001/2025. Perubahan dilakukan karena adanya refocusing kegiatan dan realokasi anggaran. Perubahan Perjanjian Kinerja Kapanewon Gedangsari Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel II.4 Perjanjian Kinerja Kapanewon Gedangsari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025

No.	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	Indeks Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon Tahun 2026	Indeks	81
2.	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah Potensi Budaya Lokal Yang Dilestarikan	Potensi Budaya	2

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	Indeks	81
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai AKIP PD	Nilai	80,08 (A)
3	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	Potensi Budaya	2



Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

Tabel II.5 Anggaran pada Perubahan Perjanjian Kinerja Kapanewon Gedangsari Tahun 2025

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Rp 30.000.000,00	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Rp 29.560.000,00	APBD
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.423.091.062,00	APBD
4.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 42.911.000,00	APBD
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 64.692.500,00	APBD
6.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 19.548.900,00	APBD
7.	Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 85.992.900,00	APBD
8.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 495.274.800,00	APBD

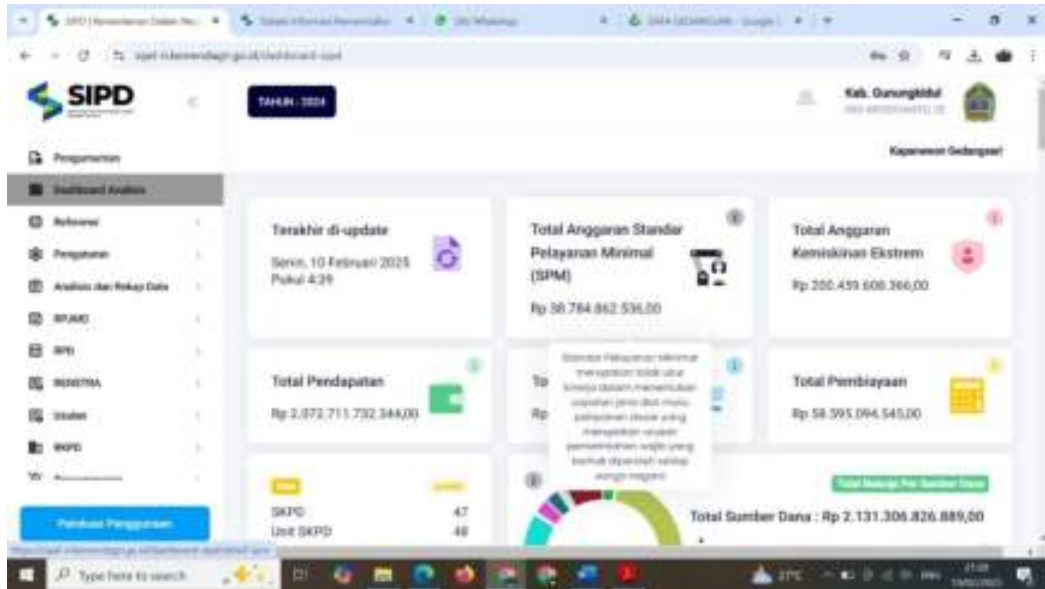
E. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

a. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) merupakan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah yang mendukung pencapaian kinerja dalam penyusunan dokumen perencanaan, mengawal proses perencanaan, serta merespon aspirasi masyarakat. Selain itu aplikasi ini juga mendukung pencapaian kinerja dalam penyusunan



dokumen rencana kerja anggaran (RKA). Tampilan SIPD dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar II.1. Gambar aplikasi SIPD

- b. Sistem Informasi Manajemen Aset (Sim Aset), merupakan aplikasi yang digunakan untuk mendukung penyusunan laporan aset. Tampilan aplikasi Sim Aset dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar II.2. Gambar aplikasi Sim Aset



- c. Aplikasi online input persediaan merupakan aplikasi yang digunakan untuk mendukung kinerja dalam penyusunan laporan persediaan/bahan habis pakai. Tampilan aplikasi adalah sebagai berikut:



Gambar II.3. Gambar aplikasi Persediaan

- d. SIPANDA merupakan aplikasi yang digunakan untuk mengevaluasi capaian indikator RKPD maupun RPJMD baik evaluasi fisik maupun evaluasi keuangan.



Gambar II.4. Gambar aplikasi SIPANDA



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III berisi:

- A. *Capaian Kinerja Tahun 2025*
- B. *Capaian Kinerja Lainnya*
- C. *Realisasi Anggaran*
- D. *Inovasi*

A. Capaian Kinerja Tahun 2025

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas yang menunjukkan sejauhmana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan dalam sistem akuntabilitas kinerja ini adalah Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam regulasi ini, juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah.

Pengukuran Kinerja

Kapanewon Gedangsari Kabupaten Gunungkidul telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan Kapanewon Gedangsari Kabupaten Gunungkidul dengan Bupati Gunungkidul tahun 2025. Pengukuran Kinerja mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86



Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91 ≤ 100	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3.	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4.	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target dari sasaran strategis yang telah ditetapkan adalah dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Kapanewon Gedangsari tahun 2025. Pencapaian IKU tahun 2025 secara ringkas ditunjukkan sebagai berikut:

Tabel III.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Kapanewon Gedangsari Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2021	CAPAIAN 2024	TAHUN 2025				TARGET AKHIR RPJMD
						TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA/ KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan	Indikator: Indeks Pelayanan Kapanewon	indeks	80,25	102,14	81,00	84,39	104,18	Sangat Baik	81,25
2	Akuntabilitas kinerja PD Meningkatkan	Indikator: Nilai AKIP PD	indeks	80,05 (A)	101,02 (A)	80,08 (A)	81,44(A)	101,70	Sangat Baik	80,09 (A)
3	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Indikator: Jumlah Potensi Budaya Lokal Yang Dilestarikan	Potensi Budaya	0	2	2	2	100	Sangat Baik	2



Berikut ini akan diuraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja yang menjelaskan capaian kinerja tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut:


Tujuan : Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas

Tujuan Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang Berkualitas Kapanewon Gedangsari diukur dengan indikator kinerja Indeks Kualitas Pelayanan Kapanewon, yang juga digunakan sebagai indikator pada sasaran strategis yang mendukung pencapaian tujuan dimaksud. Oleh karena itu, capaian tujuan dan capaian sasaran memiliki keterkaitan langsung serta menunjukkan arah kinerja yang sama.

Target Indeks Kualitas Pelayanan Kapanewon Gedangsari Tahun 2026 yang ditetapkan dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebesar 81,25. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi Indeks Kualitas Pelayanan Kapanewon Gedangsari tahun 2025 sebesar 84,39. Dengan demikian, tujuan sudah melampaui target yang ditetapkan. Persentase capaian kinerja mencapai 103,86 persen, yang menunjukkan kinerja tujuan sudah pada kategori sangat baik dan target jangka menengah di tahun 2026 sudah dapat tercapai pada tahun 2025.

Mengingat indikator yang digunakan pada tujuan dan sasaran adalah indikator yang sama, maka analisis lebih lanjut mengenai capaian kinerja, faktor pendukung, kendala, serta upaya perbaikan secara rinci diuraikan pada bagian analisis capaian sasaran strategis. Dengan demikian, capaian tujuan telah tercermin dalam capaian sasaran yang mendukungnya.



	<p>Sasaran 1</p> <p>“Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat”</p>
---	---

Kapanewon mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan serta melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Sesuai dengan tugas tersebut, kapanewon berusaha melaksanakan fungsinya dengan maksimal untuk mewujudkan sasaran strategis kapanewon yaitu Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat.

Pencapaian target sasaran ini diukur dengan satu indikator kinerja yaitu Indeks Pelayanan Kapanewon. Indeks Pelayanan Kapanewon diperoleh dari jumlah persentase penyusunan APBKal benar dan tepat waktu, penyusunan RKPKal benar dan tepat waktu, KK miskin yang tertangani, penanganan ketentraman dan ketertiban umum, dan nilai indeks kepuasan masyarakat. Secara rinci pengukuran kinerja atas indikator ini dirumuskan sebagai berikut:

Tabel III.3 Rumusan Pengukuran Kinerja Indikator

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Alasan/Penjelasan/ Formulasi
Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	$\Sigma [20\% \times \text{persentase penyusunan APBKal benar dan tepat waktu}] + [20\% \times \text{persentase penyusunan RKPKal benar dan tepat waktu}] + [20\% \times \text{persentase KK miskin yang tertangani}] + [20\% \times \text{persentase penanganan ketentraman dan ketertiban umum}] + [20\% \times \text{nilai indeks kepuasan masyarakat}]$
		a. Persentase penyusunan APBKal benar dan tepat waktu = $(\Sigma \text{Kal yang menyusun APBKal benar dan tepat waktu} / \Sigma \text{Kalurahan}) \times 100\%$



Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Alasan/Penjelasan/ Formulasi
		<p>Yang dimaksud dengan tepat waktu adalah APBKal ditetapkan dalam batas waktu paling lambat tanggal 31 Desember Tahun -1</p> <p>b. Persentase penyusunan RPKKal benar dan tepat waktu = $\left(\frac{\sum \text{Kal yang menyusun RPKKal benar dan tepat waktu}}{\sum \text{Kalurahan}} \right) \times 100\%$ Yang dimaksud dengan tepat waktu adalah RPKKal ditetapkan dalam batas waktu paling lambat bulan September Tahun -1</p>
		<p>c. Persentase KK miskin yang tertangani = $\left(\frac{\sum \text{KK miskin penerima bantuan}}{\sum \text{KK Miskin}} \right) \times 100\%$</p>
		<p>d. Persentase penanganan ketentraman dan ketertiban umum = $\left(\frac{\sum \text{penanganan ketentraman dan ketertiban umum}}{\sum \text{Kasus gangguan penanganan ketentraman dan ketertiban umum}} \right) \times 100\%$</p>
		<p>e. Nilai indeks kepuasan masyarakat = $\left(\frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \right) \times \text{nilai penimbang}$ Dimana bobot nilai rata-rata tertimbang = Jumlah bobot dibagi jumlah unsur = 1 dibagi 9 = 0,11. Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25 dengan rumus IKM Unit Pelayanan x 25</p> <p>Tipologi data: Non komulatif</p>



Pencapaian pada sasaran ini digambarkan pada tabel berikut:

Tabel III.4 Capaian Sasaran Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkatkan

No	Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025 (%)	Kategori
1	Indeks Pelayanan Kapanewon	81,00	84,39	104,18	Sangat Baik

Dari data tersebut di atas terlihat bahwa capaian kinerja sebesar 104.18%, Capaian ini termasuk kategori sangat tinggi dengan realisasi 84,39 melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 81,00.

Dari evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa target kinerja dapat terealisasi bahkan bisa melebihi target yang ditetapkan. Keberhasilan capaian kinerja Indeks Pelayanan Kapanewon tersebut diperoleh dari:

- a. Persentase penyusunan APBKal benar dan tepat waktu

Persentase penyusunan APBKal benar dan tepat waktu tercapai 100%.

Dari 7 (Tujuh) kalurahan di Kapanewon Gedangsari, semua Kalurahan dapat menetapkan APBKal 2025 dengan benar dan tepat waktu yaitu di Bulan Desember 2025. Data dapat dilihat pada tabel III.3 dibawah.

- b. Persentase penyusunan RPKKal benar dan tepat waktu

Persentase penyusunan RPKKal benar dan tepat waktu tercapai 86%.

Dari jumlah 7 (tujuh) kalurahan di Kapanewon Gedangsari, semua Kalurahan dapat menetapkan RPKKal 2025 dengan benar dan tepat yaitu di bulan September 2025.

Gambar III.1 Musyawarah Kalurahan dalam Menyusun RPKKal dan APBKal





c. Persentase KK miskin yang tertangani

Persentase persentase KK miskin yang tertangani tercapai 39,75%. Jumlah 9.603 KK miskin kategori desil 1 dan 2 yang mendapat bantuan dari Kemensos (PKH, BPNT, JKN PBI) sejumlah 3.817 KK. Kapanewon Gedangsari juga memfasilitasi bantuan sosial PIWK dan droping air dengan target penerima bantuan 320 KK terdiri dari jamban sehat 38 KK, Penampungan Air Hujan (PAH) 19 KK dan droping air 253 KK dapat terealisasi semua.

Gambar III.2 Droping Air di Kapanewon Gedangsari



Gambar III.3 Penyerahan Bantuan Sosial Jamban





d. Persentase penanganan ketentraman dan ketertiban umum

Persentase Ketentraman dan Ketertiban yang tertangani tercapai 100%. Kapanewon Gedangsari sesuai dengan kewenangan dapat meminimalisir dan mencegah potensi pelanggaran peraturan yang terjadi di tahun 2025 terkait dengan trantibum, hal ini dilakukan bersinergi bersama Polsek dan Koramil.

Gambar III.5 Rapat Koordinasi Pembinaan dan Ketentraman dan Ketertiban Umum



Tabel III.5 Pengukuran Capaian Sasaran

No	Kalurahan	Penyusunan APBKal	Penyusunan RPKKal	KK miskin tertangani/ menerima bantuan	Jumlah DTKS	Penanganan Ketentraman dan ketertiban
1	Hargomulyo	Tepat Waktu	Tepat Waktu	787	1.680	Nihil
2	Mertelu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	431	1.001	Nihil
3	Watugajah	Tepat Waktu	Tepat Waktu	336	912	Nihil
4	Sampang	Tepat Waktu	Tepat Waktu	237	621	Nihil
5	Serut	Tepat Waktu	Tepat Waktu	424	939	Nihil
6	Ngalang	Tepat Waktu	Tepat Waktu	937	1.723	Nihil
7	Tegalrejo	Tepat Waktu	Tepat Waktu	665	2.724	Nihil
Jumlah				3.817	9.603	

Sumber: Data Jawatan Praja, Jawatan Kemakmuran, Jawatan Sosial, Jawatan Keamanan dan Pendamping PKH



e. Nilai indeks kepuasan masyarakat

Berdasarkan hasil penghitungan Survei Kepuasan Masyarakat, indeks kepuasan Masyarakat Kapanewon Gedangsari pada tahun 2025 tercapai 82,20. Data akhir tersebut diperoleh dari nilai survei komposit (gabungan) dari 9 unit pelayanan yaitu persyaratan; sistem, mekanisme dan prosedur; waktu penyelesaian, informasi pelayanan; produk spesifikasi jenis pelayanan; kompetensi pelaksana; perilaku pelaksana; maklumat pelayanan; penanganan pengaduan, saran dan masukan. Adapun capaian nilai IKM Kapanewon Gedangsari sebesar 82,20 lebih tinggi apabila dibandingkan dengan capaian nilai IKM Kabupaten Semester 1 2025 yang tercapai sebesar 82,11.

Beberapa dokumentasi kegiatan yang mendukung capaian Indeks Pelayanan Kapanewon adalah sebagai berikut:



Gambar III.5 Ruang Pelayanan



Realisasi kinerja 84,39 pada tahun 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan pada 2024. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu 2023 dan 2024 dan dibandingkan dengan target akhir Renstra di tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel III.6
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023-2025
serta Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di Tahun 2026

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2025 terhadap 2026 (%)
		2023	2024	2025		
1	Indeks Pelayanan Kapanewon	96,26	82,48	84,39	81,25	103,86

Dari data tersebut di atas terlihat capaian realisasi kinerja pada tahun 2023 sebesar 96,26 menurun menjadi 82,48 pada tahun 2024, dan pada tahun 2025 naik menjadi 84,39 karena semua Kalurahan tepat dalam menetapkan RKP Kal tetapi juag adanya penurunan indikator persentase penanganan kemiskinan. Capaian realisasi kinerja di tahun 2025 ini bahkan sudah melampaui dari target Akhir Renstra di tahun 2026 yang ditetapkan sebesar 81,25.

Pencapaian target Sasaran Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat terutama didukung oleh program prioritas yang mendukung sasaran strategis kapanewon, yaitu

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
4. Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Pencapaian program prioritas tersaji dalam tabel 3.5 Evaluasi Pencapaian Kinerja Program pada Sasaran Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat:



Tabel III.7
Evaluasi Pencapaian Kinerja Program

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Tahun 2025 (%)	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%) Kategori
1	Indeks Pelayanan Kapanewon	104,18	1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik terlaksana	100	97.38	Sangat Baik
			2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan terfasilitasi	100	99.91	Sangat Baik
			3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum terfasilitasi	100	99.82	Sangat Baik
			4. Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terfasilitasi	100	99.89	Sangat Baik
			5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa terlaksana	100	97.90	Sangat Baik
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM					100	98.98	Sangat Tinggi

Dari hasil evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa capaian kinerja program sebesar rata-rata 98,98% termasuk kategori sangat tinggi.

Dalam melaksanakan program-program prioritas dianggarkan sebesar Rp 708.420.100,00 dalam realisasinya menyerap anggaran sebesar Rp 696.725.360,00 (98,35%) sehingga dengan capaian kinerja mencapai



104,18% terdapat efisiensi penggunaan sumberdaya sebesar 105,93% yang dirinci dalam tabel berikut:

Tabel III.8
Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

No.	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi (%)
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
1	Indeks Pelayanan Kapanewon	81,00	84,39	104,18	708.420.100	696.725.360	98.35	105,93


Permasalahan:

1. Capaian realisasi anggaran pada program penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik hanya menyerap anggaran 97,38%, karena pada subkegiatan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan realisasi anggaran sebesar Rp. 36.409.234,00 dari pagu Rp. 37.520.000,00 dikarenakan adanya sisa pembayaran jasa THL.
2. Capaian realisasi anggaran pada Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa hanya menyerap 97,90%, karena pada subkegiatan Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa realisasi anggaran sebesar Rp. 450.924.076,00 dari pagu Rp. 461.210.000,00 dikarenakan adanya sisa tender pengadaan bansos.

Solusi:

1. Melakukan pencermatan shbj untuk pengadaan barang bansos.



	<p>Sasaran 2</p> <p>”Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah”</p>
---	---

Perangkat Daerah mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah merupakan perwujudan dalam melaksanakan kewajiban tersebut dan meningkatnya akuntabilitas kinerja menjadi sasaran yang harus dicapai oleh Perangkat Daerah.

Kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah diukur dengan indikator Nilai AKIP PD. Penjelasan rumusan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.9 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Indikator Nilai AKIP PD

Sasaran	Indikator	Meta Indikator
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja PD	Nilai AKIP PD	<p>Indikator ini mengukur kualitas implementasi AKIP Kapanewon Gedangsari Tahun n-1. Nilai AKIP PD merupakan hasil akhir penjumlahan nilai tertimbang dari komponen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan kinerja bobot 30%; 2. Pengukuran kinerja bobot 30%; 3. Pelaporan Kinerja bobot 15%; 4. Evaluasi kinerja internal bobot 25%. <p>Interpretasi data: Predikat AA (Nilai >90-100) Predikat A (Nilai >80-90) Predikat BB (Nilai >70-80) Predikat B (Nilai >60-70) Predikat CC (Nilai >50-60) Predikat C (Nilai >30-50) Predikat D (Nilai >0-30)</p>



Target kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD dengan indikator kinerja Nilai AKIP PD tahun 2025 ditargetkan sebesar 80,08 namun sampai laporan ini disusun, LHE AKIP tahun 2025 masih dalam proses evaluasi di Inspektorat Daerah, sehingga dalam menghitung pencapaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah menggunakan Nilai AKIP Tahun 2024. Kapanewon Gedangsari mendapatkan nilai 81,44 masuk kategori Sangat Baik pada hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja tahun 2024.

Tabel III.10
Evaluasi Pencapaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Kategori
1	Nilai AKIP PD	80,08	81,44	101,70	Sangat Baik

Dari data tersebut di atas terlihat dari target yang ditetapkan sebesar 80,08 terealisasi 81,44 sehingga capaian kinerja sebesar 101,70%.

Berdasarkan surat dari Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 700.1.2.7/EV-LKJIP/48 tanggal 27 Maret 2025 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kapanewon Gedangsari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024, Kapanewon Gedangsari terdapat tindak lanjut atas rekomendasi sebagai berikut:

Tabel III.11 Tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi SAKIP Tahun 2024

No	Komponen	Catatan	Rekomendasi	Konfirmasi Tindak Lanjut
1	Perencanaan Kinerja	Tidak terdapat catatan hasil evaluasi	Tidak terdapat rekomendasi	-
2	Pengukuran Kinerja	Tidak terdapat catatan hasil evaluasi	Tidak terdapat rekomendasi	-
3	Pelaporan Kinerja	a. Dokumen laporan kinerja belum seluruhnya mengungkap informasi tentang pencapaian kinerja yaitu berupa data	a. Dokumen laporan kinerja mengungkap informasi berupa data pendukung sebagai	Akan ditindaklanjuti sesuai rekomendasi



No	Komponen	Catatan	Rekomendasi	Konfirmasi Tindak Lanjut
		pendukung capaian kinerja; dan b. Pimpinan unit kerja belum sepenuhnya memantau seluruh pencapaian yang ada dalam laporan kinerja.	dasar penghitungan capaian kinerja; dan b. Pimpinan unit agar memantau seluruh pencapaian yang ada dalam laporan kinerja.	
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.	Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.	Akan ditindaklanjuti sesuai rekomendasi

Realisasi kinerja 81,44 pada tahun 2025 mengalami peningkatan jika dibandingkan pada 2024 yang sebesar 80,89. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun 2024 dan dibandingkan dengan target akhir Renstra di tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel III.12
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024-2025
serta Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di Tahun 2026

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja		Target Akhir Renstra (2026)	Capaian 2025 terhadap 2026 (%)
		2024	2025		
1	Nilai AKIP PD	80,89	81,44*	80,09	101,70

*Nilai AKIP Tahun n-1

Dari evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa realisasi kinerja terus meningkat. Program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD ini adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Untuk mengetahui capaian program dapat dilihat dari tabel berikut:



Tabel III.13
Evaluasi Pencapaian Kinerja Program

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%) Kategori
1	Nilai AKIP PD	101,70	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten terlaksana dengan baik	100	99,73	100 Sangat Baik

Dalam melaksanakan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tersebut dianggarkan sebesar Rp. 1.423.091.062 dalam realisasinya hanya menyerap anggaran sebesar Rp 1.419.210.938 (99,73%) sehingga efisiensi penggunaan sumberdaya sebesar 101,97% seperti terlihat sebagai berikut:

Tabel III.14
Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

No.	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Anggaran			Efisiensi (%)
			Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
1	Nilai AKIP PD	101,70	1.423.091.062	1.419.210.938	99,73	101,97

Permasalahan:

1. Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang pagu anggarannya sebesar Rp. 7.300.000,00 sedangkan realisasi anggarannya sebesar Rp. 5.494.500,00 karena harga barang dipasaran diatas SHBJ maka dibelikan harga dibawah pagu.

Solusi:

1. Lebih cermat dalam barang dengan melakukan survey harga dan apabila perlu mengusulkan SHBJ yang sesuai.



Tujuan 2 Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan

Tujuan Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan diukur dengan indikator kinerja Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan. Pencapaian tujuan ini didukung dengan sasaran yaitu Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan. Pengukuran tujuan dan sasaran menggunakan indikator kinerja yang sama sehingga capaian tujuan dan sasaran Kapanewon Gedangsari dianalisis secara terpadu dengan capaian sasaran strategis secara langsung mencerminkan tingkat keberhasilan pencapaian tujuan.

	<p>Sasaran 3 "Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan"</p>
--	---

Sasaran Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan ditetapkan sebagai target dari penerapan keistimewaan di tingkat kapanewon. Pembangunan keistimewaan DIY yang diarahkan ke kapanewon terkait dengan urusan penguatan kelembagaan di tingkat kapanewon dan urusan kebudayaan. Kelembagaan yang telah dibentuk harus didorong agar dapat berjalan dan berfungsi secara optimal sehingga dapat mempresentasikan tujuan Keistimewaan DIY. Sedangkan urusan kebudayaan diarahkan untuk mendorong pembangunan kebudayaan dalam arti luas dan juga diupayakan untuk meningkatkan pelestarian budaya dan mengoptimalkan aset-aset yang telah dibangun dengan dana keistimewaan.

Indikator Sasaran Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan adalah jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan. Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan pada tahun 2025 sebanyak 2 (dua) potensi. Pencapaian pada sasaran ini dijelaskan pada tabel capaian sasaran pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan sebagai berikut:



Tabel III.15

Capaian Sasaran Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	2	2	100	Sangat Baik

Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan pada tahun 2025 ditargetkan sebesar 2 terealisasi sebesar 2 sehingga realisasi kinerjanya mencapai 100,00% masuk kategori sangat tinggi.

Realisasi kinerja 100% pada tahun 2025 sama jika dibandingkan pada 2024. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan tahun-tahun sebelumnya yaitu 2023 dan 2024 dan dibandingkan dengan target akhir Renstra di tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel III.16

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023-2025 serta Perbandingan dengan Target Akhir Renstra di Tahun 2026

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian 2025 terhadap 2026 (%)
		2023	2024	2025		
1	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	2	2	2	2	100

Konsistensi capaian kinerja Pemerintah Kapanewon Gedangsari pada Sasaran Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal Untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan didukung dengan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan.

Untuk mengetahui capaian program selengkapnya dapat dilihat dari tabel berikut:



Tabel III.17
Evaluasi Pencapaian Program

No	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	Capaian (%) Kategori
1	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	100	1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	100	99,94	100 Sangat Baik
			2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Persentase Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	100	99,89	100 Sangat Baik
RATA-RATA CAPAIAN INDIKATOR PROGRAM					100	99,91	100 Sangat Baik

Dari hasil evaluasi data tersebut di atas terlihat bahwa capaian kinerja program sebesar rata-rata 99,91% termasuk kategori sangat tinggi.

Dalam melaksanakan program-program prioritas dianggarkan sebesar Rp 59.560.000,00 dalam realisasinya menyerap anggaran sebesar Rp 59.507.451,00 (99,91%) sehingga dengan capaian kinerja mencapai 100,09% terdapat efisiensi penggunaan sumberdaya sebesar 100% yang dirinci dalam tabel berikut:

Tabel III.18
Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

No.	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi (%)
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
1	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	2	2	100	59.560.000	59.507.541	99,91	100,09



Permasalahan:

1. Subkegiatan Gelar Budaya Jogja pagu anggaran sebesar Rp. 30.000.000,00, realisasi anggaran Rp. 29.981.092,00 karena sisa belanja purchasing.

Solusi:

1. Masukan untuk platform e-purchasing agar aplikasi mengakomodasi harga sesuai pagu atau SHBJ.

B. Capaian Kinerja Lainnya

Pengukuran capaian kinerja Kapanewon Gedangsari meliputi capaian kinerja untuk sasaran strategis. Untuk capaian kinerja lainnya Kapanewon Gedangsari pada tahun 2025 adalah program/kegiatan yang terkait dengan pengarusutamaan gender dalam pembangunan.

Capaian Kinerja terkait dengan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan

Perspektif pengarusutamaan gender menjadi pertimbangan dan harus selalu diintegrasikan dalam kegiatan pembangunan fisik maupun kegiatan yang bersifat non fisik. Dengan kata lain pengarusutamaan gender menjadi bagian dari perencanaan pembangunan yang dilakukan di Kapanewon Gedangsari. Output dari program yang dilakukan tetap responsif dan sensitif terhadap kebijakan pengarusutamaan gender, dimana sasaran dan perencanaan mempertimbangkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat bagi kelompok rentan 5 (lima) afirmatif gender yaitu perempuan, warga miskin, lansia, anak-anak dan penyandang disabilitas.

Setiap program yang dilakukan harus mempertimbangan 5 (lima) kelompok afirmatif gender mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, hingga evaluasi. Partisipasi dalam perencanaan tidak boleh membatasi apalagi menghalangi aspirasi dan kebutuhan kelompok rentan, sesuai dengan kondisi dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki Kapanewon Gedangsari. Afirmasi gender dalam program/kegiatan



diterapkan mulai dari tahapan perencanaan melalui penyusunan dokumen GAP/GBS (Gender Affirmative Program/Gender Budget Statements) pada setiap tahapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah. Pemenuhan hak akses terhadap kelompok afirmatif gender juga dilakukan pada pelaksanaan program dan kegiatan di Kapanewon Gedangsari.

Upaya yang sudah dilakukan dalam pengarusutamaan gender di Kapanewon Gedangsari:

1. Melaksanakan kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya peran perempuan dalam pelestarian budaya, termasuk melalui media sosial dan acara komunitas.



Gambar III.6. Partisipasi Perempuan dalam pentas Gelar Budaya

2. Memastikan prosedur distribusi bantuan air bersih melibatkan perempuan dan mempertimbangkan waktu serta cara mereka mengakses air.



Gambar III.7. Partisipasi Perempuan dalam distribusi bantuan air



3. Menerapkan sistem seleksi yang transparan dan terbuka untuk semua calon anggota Paskibraka, tanpa diskriminasi gender.



Gambar III.8. Partisipasi Perempuan dalam Paskibraka

4. Meningkatkan kapasitas dan melibatkan secara aktif perempuan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.



Gambar III.9. Partisipasi Perempuan dalam Perencanaan Pembangunan



C. Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2025 sebesar Rp. 2.175.443.749,00 atau 99,29% dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp. 2.191.071.162,00. Jika dilihat dari realisasi anggaran per program, penyerapan anggaran terkecil pada program penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik 97,38% dan pada program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 97,90% sedangkan untuk program yang lain sudah diatas 98%.

Adapun anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel III.19
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan

No	Program/kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	30.000.000	29.981.092	99,94
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	30.000.000	29.981.092	99,94
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	29.560.000	29.526.359	99,89
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	29.560.000	29.526.359	99,89
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.423.091.062	1.419.210.938	99,73
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	11.942.700	11.942.700	100,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.157.375.192	1.157.375.192	100,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.224.800	3.157.040	97,90
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	55.991.500	55.127.547	98,46
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.300.000	5.494.500	75,27

**LAPORAN KINERJA
KAPANEWON GEDANGSARI
KABUPATEN GUNUNGGIDUL TAHUN 2025**



No	Program/kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25.945.920	25.447.920	98,08
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	161.310.950	160.666.039	99,60
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	42.911.000	41.785.690	97,38
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5.391.000	5.376.456	99,73
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	37.520.000	36.409.234	97,04
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	64.692.500	64.637.413	99,91
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	43.262.500	43.237.279	99,94
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	21.430.000	21.400.134	99,86
6	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	19.548.900	19.514.188	99,82
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	19.548.900	19.514.188	99,82
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	85.992.900	85.899.978	99,89
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	85.992.900	85.899.978	99,89
7	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	495.274.800	484.888.091	97,90
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	495.274.800	484.888.091	97,90
		2.191.071.162	2.175.443.749	99,29



D. Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain pemanfaatan media sosial misalnya layanan PPID, Instagram dan youtube untuk percepatan komunikasi, informasi dan edukasi.



BAB IV

PENUTUP

BAB IV berisi:

- A. Kesimpulan
- B. Langkah Perbaikan Kinerja

A. Kesimpulan

LKjIP menekankan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, di mana setiap Kapanewon Gedangsari melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Kapanewon Gedangsari, LKjIP menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sedangkan bagi publik sendiri, LKjIP akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKjIP merupakan wujud pertanggungjawaban sistem administrasi yang menunjukkan kemampuan menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi yang makin andal, profesional, efisien, efektif, dan tanggap terhadap aspirasi rakyat serta dinamika perubahan lingkungan strategis.

Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun 2025, namun juga melihat trend pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir Renstra. Secara umum, tampak bahwa kinerja Kapanewon Gedangsari pada tahun 2025 adalah sangat baik, karena dari 3 (tiga) sasaran yang ditetapkan dapat tercapai dengan kategori sangat tinggi.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam Bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan Kapanewon Gedangsari untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam



pembangunan. Namun demikian, beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja ke depan.

Pertama, walaupun IKU telah tercapai dengan kategori sangat baik, persoalan-persoalan di masyarakat belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik. Tantangan-tantangan ini terutama tampak dalam kondisi terkait dengan persoalan SDM, infrastruktur, pemenuhan kebutuhan air bersih dan kemiskinan.

Kedua, pentingnya koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam pencapaian sasaran, sebab tanpa koordinasi dan sinergi yang dibangun dengan sungguh-sungguh dan berpijak pada pengakuan dan penghargaan akan kontribusi berbagai pihak ini, upaya-upaya mencapai sasaran dan indikator kinerja akan menjadi lebih sulit untuk dicapai.

Ketiga, sebagai bagian dari perbaikan kinerja Kapanewon Gedangsari yang menjadi tujuan dari penyusunan LKjIP, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Hal ini akan menjadikan LKjIP benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik.

B. Langkah Perbaikan Kinerja

Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk perbaikan kinerja Kapanewon Gedangsari ke depan sebagai berikut:

1. Meningkatkan dan mengoptimalkan SDM baik secara kuantitas maupun kualitas;



2. Merancang program inovasi yang mendukung perbaikan layanan publik dan efisiensi operasional yang lebih mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan;
3. Survey kepuasan masyarakat, pertemuan terbuka, atau platform daring/sosial media untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat;
4. Penguatan kerjasama antar Stakeholder dalam lingkup Kapanewon untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi yang mendukung pencapaian tujuan sasaran Kapanewon;
5. Secara berkala melakukan evaluasi pencapaian dan hambatan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan.



LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
2. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.
3. Laporan Hasil Evaluasi AKIP Internal Tahun 2024.
4. Laporan Hasil Monitoring Tindak Lanjut LHE AKIP Internal Tahun 2024.
5. Tindak lanjut atas rekomendasi pada LHE AKIP Internal Tahun 2024.
6. Rencana Aksi Tahun 2025.
7. Perubahan Rencana Aksi Tahun 2025.
8. Sampel Laporan Pengendalian yang terdapat kendala dan rencana tindak lanjut.
9. Berita Acara Monev dan Laporan Realisasi Anggaran Triwulan I, II, III, IV Tahun 2025.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON GEDANGSARI

ꦏꦤꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦒꦺꦢꦁꦱꦫꦶ

Jalan Ngalang KM 5 Gedangsari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55863
Laman gedangsari.gunungkidulkab.go.id, Posel gedangsari@gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EKO KRISDIYANTO, SE

Jabatan : Panewu Gedangsari

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : SUNARYANTA

Jabatan : Bupati Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Pihak Kedua
SUNARYANTA

Wonosari, 5 Januari 2025


Pihak Kesatu
EKO KRISDIYANTO, SE

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KAPANEWON GEDANGSARI

No.	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	Indeks Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon Tahun 2026	Indeks	81,25
2.	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	Potensi Budaya	2

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	Indeks	81,00
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai AKIP PD	Nilai	80,08 (A)
3.	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Jumlah Potensi Budaya Lokal Yang Dilestarikan	Potensi Budaya	2

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Rp 60.000.000	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Rp 40.000.000	APBD

3. Program penunjang Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	1.582.817.348	APBD
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp	52.251.000	APBD
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan	Rp	75.222.500	APBD
6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp	21.588.900	APBD
7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp	99.992.900	APBD
8. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp	511.359.800	APBD

Wonosari, 5 Januari 2025

Pihak Kedua


 SUNARYANTA

Pihak Kesatu


 EKO KRISDIYANTO, SE



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON GEDANGSARI

ꦏꦤꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦒꦺꦢꦁꦱꦫꦶ

Jalan Ngalang KM 5 Gedangsari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55863
Laman gedangsari.gunungkidulkab.go.id, Posel gedangsari@gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUNARDI, S.IP

Jabatan : Panewu Anom Gedangsari

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : EKO KRISDIYANTO, SE

Jabatan : Panewu Gedangsari

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gedangsari, 5 Januari 2025

Pihak Kesatu

SUNARDI, S.IP



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KAPANEWON GEDANGSARI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai AKIP PD	Nilai	80,08 (A)

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program penunjang Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.582.817.348	APBD

Gedangsari, 5 Januari 2025

Pihak Kedua


EKO KRISDIYANTO, SE

Pihak Kesatu


SUNARDI, S.IP



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON GEDANGSARI

เทศบาลตำบล กงช้าง

Jalan Ngalang KM 5 Gedangsari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55863
Laman gedangsari.gunungkidulkab.go.id; Posel gedangsari@gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NARDIYANTO, S.IP

Jabatan : Kepala Jawatan Praja

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : EKO KRISDIYANTO, SE

Jabatan : Panewu Gedangsari

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang dipertukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gedangsari, 5 Januari 2025

Pihak Kedua

EKO KRISDIYANTO, SE

Pihak Kesatu

NARDIYANTO, S.IP

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KAPANEWON GEDANGSARI

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
		Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	
1. Kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon meningkat	Persentase Penyusunan APBD benar dan tepat waktu	Persen	100
	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	dokumen	3
	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa	dokumen	8
	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	dokumen	22
	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa	dokumen	1
	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala desa	dokumen	2
	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa	dokumen	1
	Jumlah dokumen rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	dokumen	3

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1.	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	3.425.000,00	APBD
2.	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	3.440.000,00	APBD
3.	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	21.703.000,00	APBD
4.	Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa	3.240.000,00	APBD
5.	Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa	6.995.000,00	APBD
6.	Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1.130.000,00	APBD
7.	Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	2.040.000,00	APBD

Gedangsari, 5 Januari 2025



Pihak Kesatu

NARDIYANTO, S.IP



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON GEDANGSARI

ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦒꦺꦢꦁꦱꦫꦶ

Jalan Ngalang KM 5 Gedangsari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55863
Laman gedangsari.gunungkidulkab.go.id; Posel gedangsari@gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TUTIK UTAMI, S.Sos

Jabatan : Kepala Jawatan Pelayanan Umum

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : EKO KRISDIYANTO, SE

Jabatan : Panewu Gedangsari

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gedangsari, 5 Januari 2025

Pihak Kesatu

TUTIK UTAMI, S.Sos



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KAPANEWON GEDANGSARI

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
		Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	
1. Kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon meningkat	Nilai Indeks kepuasan masyarakat	Indeks	82,00
	Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	laporan	13

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Rp 37.970.000,00	APBD

Gedangsari, 5 Januari 2025

Pihak Kedua

 EKO KRISDIYANTO, SE

Pihak Kesatu

 TUTIK UTAMI, S.Sos



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON GEDANGSARI

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦮꦺꦤ꧀ꦒꦺꦢꦁꦱꦂꦶ

Jalan Ngalang KM 5 Gedangsari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55863
Laman gedangsari.gunungkidulkab.go.id; Posel gedangsari@gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AGUS NUGRAHA, S.Sos

Jabatan : Kepala Jawatan Sosial

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : EKO KRISDIYANTO, SE

Jabatan : Panewu Gedangsari

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gedangsari, 5 Januari 2025

Pihak Kedua

EKO KRISDIYANTO, SE

Pihak Kesatu

AGUS NUGRAHA, S.Sos

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KAPANEWON GEDANGSARI

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
		Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	
1. Kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon meningkat	Persentase KK Miskin yang tertangani	Persen	100
	Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan PD dan instansi vertikal terkait	laporan	2
	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	lembaga	2
	Jumlah laporan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	laporan	2
	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan dengan pembangunan desa	dokumen	4
2. Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah laporan Gelar Budaya Yogyakarta	laporan	1

No	Kegiatan		Anggaran (Rp.)	Keterangan
1.	Koordinasi/Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Rp.	14.281.000,00	APBD
2.	Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	Rp.	11.260.000,00	APBD
3.	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Rp.	14.510.000,00	APBD
4.	Fasilitasi dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	Rp.	464.690.000,00	APBD
5.	Adat, Seni, tradisi dan lembaga budaya	Rp.	60.000.000,00	APBD

Gedangsari, 5 Januari 2025

Pihak Kesatu



AGUS NUGRAHA, S.Sos



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON GEDANGSARI

ꦏꦤꦧꦠꦏꦤꦠꦮꦭꦏꦁꦒꦺꦢꦁꦱꦫꦶ

Jalan Ngalang KM 5 Gedangsari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55863
Laman gedangsari.gunungkidulkab.go.id; Posel gedangsari@gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUNARNO, S.IP

Jabatan : Kepala Jawatan Keamanan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : EKO KRISDIYANTO, SE

Jabatan : Panewu Gedangsari

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gedangsari, 5 Januari 2025

Pihak Kesatu

SUNARNO, S.IP



LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KAPANEWON GEDANGSARI

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
		Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	
1. Kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon meningkat	Persentase penanganan ketentraman dan ketertiban umum	persen	100
	Jumlah Laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	laporan	2
	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, dalam rangka memantapkan pengamalan pancasila, pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemerintahan dan pemeliharaan negara kesatuan RI	orang	75
	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Dokumen	1
	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	dokumen	2

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp. 7.078.900,00	APBD
2	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bheneka Tunggal Ika sera pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Rp. 89.882.900,00	APBD
3	Pelaksanaan Tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan	Rp. 10.110.000,00	APBD
4	Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Rp. 4.696.800,00	APBD



 Pihak Kedua
 EKO KRISDIYANTO, SE

Gedangsari, 5 Januari 2025

Pihak Kesatu



 SUNARNO, S.IP



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON GEDANGSARI

ꦏꦁꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦒꦺꦢꦁꦱꦫꦶ

Jalan Ngalang KM 5 Gedangsari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55863
Laman gedangsari.gunungkidulkab.go.id, Posel gedangsari@gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RINI WIDIASTUTI, SE

Jabatan : Kepala Jawatan Sosial

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : EKO KRISDIYANTO, SE

Jabatan : Panewu Gedangsari

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gedangsari, 5 Januari 2025

Pihak Kesatu

RINI WIDIASTUTI, SE



EKO KRISDIYANTO, SE

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KAPANEWON GEDANGSARI

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
		Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	
1. Kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon meningkat	Persentase penyusunan RKPkal benar dan tepat waktu	Persen	100
	Jumlah dokumen sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Dokumen	11
	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	laporan	9
	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	laporan	4
2. Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah dokumen hasil penerapan keistimewaan di kapanewon/kemantren dan kalurahan/kelurahan yang didampingi	Dokumen	3

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Rp 39.152.500,00	APBD
2	Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Rp 11.800.000,00	APBD
3	Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Rp 13.010.000,00	APBD
4	Perencanaan dan pengendalian urusan kelembagaan	Rp 40.000.000,00	APBD

Gedangsari, 5 Januari 2025

Pihak Kesatu



RINI WIDIASTUTI, SE



EKO KRISDIYANTO, SE



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON GEDANGSARI

ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦒꦺꦢꦁꦱꦫꦶ

Jalan Ngalang KM 5 Gedangsari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55863
Laman gedangsari.gunungkidulkab.go.id; Posel gedangsari@gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUHIRMAN, S.IP

Jabatan : Kepala Subbag Umum

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : SUNARDI, S.IP

Jabatan : Panewu Anom Gedangsari

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gedangsari, 5 Januari 2025

Pihak Kedua

SUNARDI, S.IP

Pihak Kesatu

SUHIRMAN, S.IP

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KAPANEWON GEDANGSARI

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
		Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Jumlah dokumen pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	dokumen	6
	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	2
	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	6
	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	paket	4
	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	5
	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	dokumen	248
	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	laporan	12
	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	16
	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	1
	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	unit	1
	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan	laporan	36
	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan	1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
		Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	
	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinanya	unit	106
	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	10
	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	2
	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	4
	Jumlah laporan evaluasi kinerja PD	laporan	3

No	Kegiatan		Anggaran (Rp.)	Keterangan
1.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp.	3.224.800,00	APBD
2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp.	7.300.000,00	APBD
3.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	61.640.000,00	APBD
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	25.945.920,00	APBD
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp.	161.110.950,00	APBD

Gedangsari, 5 Januari 2025

Pihak Kedua



SUNARDI, S.IP

Pihak Kesatu



SUHIRMAN, S.IP



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON GEDANGSARI

ꦏꦁꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦒꦺꦢꦁꦱꦫꦶ

Jalan Ngalang KM 5 Gedangsari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55863
Laman gedangsari.gunungkidulkab.go.id; Posel gedangsari@gunungkidulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SULISTIYO, S.Sos

Jabatan : Kepala Subbag Perencanaan dan Keuangan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : SUNARDI, S.IP

Jabatan : Panewu Anom Gedangsari

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gedangsari, 5 Januari 2025

Pihak Kedua

SUNARDI, S.IP

Pihak Kesatu

SULISTIYO, S.Sos

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KAPANEWON GEDANGSARI

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
	(1)	(2)	(3)	
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/bulan	252
		Jumlah dokumen perencanaan Peranganat Daerah	dokumen	3
		Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	dokumen	1
		Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	dokumen	1
		Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD	dokumen	2
		Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD	dokumen	2
		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian ikhtisar realisasi kinerja SKPD	laporan	17
		Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun	laporan	1

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
	(1)	(2)	(3)	
		Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	laporan	13

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1.	Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 15.652.700,00	APBD
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 1.307.942.478,00	APBD

Gedangsari, 5 Januari 2025

Pihak Kedua



SUNARDI, S.IP

Pihak Kesatu



SULISTIYO, S.Sos



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON GEDANGSARI

ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦒꦺꦢꦁꦱꦫꦶ

Jalan Ngalang KM 5 Gedangsari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55863
Laman gedangsari.gunungkidulkab.go.id; Posel gedangsari@gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EKO KRISDIYANTO, SE

Jabatan : Panewu Gedangsari

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH, S.E., M.P

Jabatan : Bupati Gunungkidul

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Wonosari, 04 September 2025

Pihak Kedua

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

Pihak Kesatu

EKO KRISDIYANTO, SE

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

KAPANEWON GEDANGSARI

No.	Tujuan Perangkat Daerah	Indikator Tujuan Perangkat Daerah	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon yang berkualitas	Indeks Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Kapanewon Tahun 2026	Indeks	81,25
2.	Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah potensi budaya lokal yang dilestarikan	Potensi Budaya	2

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon Meningkat	Indeks Pelayanan Kapanewon	Indeks	81,00
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai AKIP PD	Nilai	80,08 (A)
3.	Pelestarian Potensi Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	Jumlah Potensi Budaya Lokal Yang Dilestarikan	Potensi Budaya	2

No.	Program	Anggaran Setelah Perubahan	Keterangan
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kebudayaan	Rp 30.000.000	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Rp 29.560.000	APBD
3.	Program penunjang Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 1.444.376.054	APBD
4.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 42.911.000	APBD
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan	Rp 64.692.500	APBD
6.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 19.548.900	APBD
7.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 85.992.900	APBD
8.	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp 495.274.800	APBD

Wonosari, 04 September 2025

Pihak Kedua

 ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

Pihak Kesatu

 EKO KRISDIYANTO, SE



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON GEDANGSARI

ꦏꦤꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦒꦺꦢꦁꦱꦫꦶ

Jalan Ngalang KM 5 Gedangsari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55863
Laman gedangsari.gunungkidulkab.go.id; Posel gedangsari@gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUNARDI, S.IP

Jabatan : Panewu Anom Gedangsari

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : EKO KRISDIYANTO, SE

Jabatan : Panewu Gedangsari

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua

EKO KRISDIYANTO, SE

Gedangsari, 04 September 2025

Pihak Kesatu

SUNARDI, S.IP

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KAPANEWON GEDANGSARI

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Nilai AKIP PD	Nilai	80,08 (A)

No.	Program	Anggaran		Keterangan
1.	Program penunjang Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	1.423.091.062	APBD

Gedangsari, 04 September 2025



Pihak Kedua

EKO KRISDIYANTO, SE

Pihak Kesatu

SUNARDI, S.IP



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON GEDANGSARI

ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦒꦺꦢꦁꦱꦂꦶ

Jalan Ngalang KM 5 Gedangsari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55863
Laman gedangsari.gunungkidulkab.go.id; Posel gedangsari@gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUHIRMAN, S.IP

Jabatan : PIt. Kepala Subbag Perencanaan dan Keuangan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : SUNARDI, S.IP

Jabatan : Panewu Anom Gedangsari

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gedangsari, 04 September 2025

Pihak Kedua

SUNARDI, S.IP

Pihak Kesatu

SUHIRMAN, S.IP

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KAPANEWON GEDANGSARI

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
	(1)	(2)	(3)	
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja PD	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Orang/bulan	252
		Jumlah dokumen perencanaan Peranganat Daerah	dokumen	3
		Jumlah dokumen RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	dokumen	1
		Jumlah dokumen perubahan RKA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA SKPD	dokumen	1
		Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD	dokumen	2
		Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD	dokumen	2
		Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian ikhtisar realisasi kinerja SKPD	laporan	17
		Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun	laporan	1

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Jumlah
	(1)	(2)	(3)	
		Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	laporan	13

No	Kegiatan		Anggaran (Rp.)	Keterangan
1.	Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi Kinerja dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	11.942.700,00	APBD
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp.	1.157.375.192,00	APBD

Gedangsari, 04 September 2025

Pihak Kedua



SUNARDI, S.IP

Pihak Kesatu



SUHIRMAN, S.IP



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON GEDANGSARI

ꦏꦤꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦒꦺꦢꦁꦱꦫꦶ

Jalan Ngalang KM 5 Gedangsari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55863
Laman gedangsari.gunungkidulkab.go.id; Posel gedangsari@gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUHIRMAN, S.IP

Jabatan : Kepala Subbag Umum

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : SUNARDI, S.IP

Jabatan : Panewu Anom Gedangsari

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gedangsari, 04 September 2025

Pihak Kedua

SUNARDI, S.IP

Pihak Kesatu

SUHIRMAN, S.IP

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KAPANEWON GEDANGSARI

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
		Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	
Meningkatnya Akuntabilitas Kenerja PD	Jumlah dokumen pendataan dan pengelolaan administrasi kepegawaian	dokumen	6
	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	paket	2
	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	paket	6
	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	paket	4
	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket	5
	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	dokumen	248
	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	laporan	12
	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	laporan	16
	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit	1
	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	unit	1
	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik yang disediakan	laporan	36
	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	laporan	1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
		Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	
	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinanya	unit	106
	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit	10
	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	2
	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit	4
	Jumlah laporan evaluasi kinerja PD	laporan	3

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1.	Adminitrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 3.224.800,00	APBD
2.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 55.991.500,00	APBD
3.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 7.300.000,00	APBD
4.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 25.945.920,00	APBD
5.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 161.310.950,00	APBD

Gedangsari, 04 September 2025

Pihak Kedua



SUNARDI, S.IP

Pihak Kesatu



SUHIRMAN, S.IP



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON GEDANGSARI

ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦒꦺꦢꦁꦱꦫꦶ

Jalan Ngalang KM 5 Gedangsari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55863
Laman gedangsari.gunungkidulkab.go.id; Posel gedangsari@gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TUTIK UTAMI, S.Sos

Jabatan : Kepala Jawatan Pelayanan Umum

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : EKO KRISDIYANTO, SE

Jabatan : Panewu Gedangsari

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gedangsari, 04 September 2025

Pihak Kedua



EKO KRISDIYANTO, SE

Pihak Kesatu

TUTIK UTAMI, S.Sos

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KAPANEWON GEDANGSARI

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
		Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	
1. Kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon meningkat	Nilai Indeks kepuasan masyarakat	Indeks	82,00
	Jumlah laporan peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	laporan	13

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Peningkatan efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Rp 37.520.000,00	APBD

Gedangsari, 04 September 2025



Pihak Kedua

EKO KRISDIYANTO, SE

Pihak Kesatu

TUTIK UTAMI, S.Sos



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON GEDANGSARI

ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦒꦺꦢꦁꦱꦫꦶ

Jalan Ngalang KM 5 Gedangsari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55863
Laman gedangsari.gunungkidulkab.go.id; Posel gedangsari@gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RINI WIDIASTUTI, SE
Jabatan : Kepala Jawatan Sosial
Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : EKO KRISDIYANTO, SE
Jabatan : Panewu Gedangsari
Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gedangsari, 04 September 2025

Pihak Kedua



EKO KRISDIYANTO, SE

Pihak Kesatu

RINI WIDIASTUTI, SE

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KAPANEWON GEDANGSARI

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
		Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	
1. Kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon meningkat	Persentase penyusunan RKPkal benar dan tepat waktu	Persen	100
	Jumlah dokumen sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Dokumen	11
	Jumlah laporan peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	laporan	9
	Jumlah laporan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	laporan	4
2. Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah dokumen hasil penerapan keistimewaan di kapanewon/kemantren dan kalurahan/kelurahan yang didampingi	Dokumen	3

No	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1	Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Rp 32.862.500,00	APBD
2	Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	Rp 11.400.000,00	APBD
3	Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat	Rp 10.172.000,00	APBD
4	Perencanaan dan pengendalian urusan kelembagaan	Rp 29.560.000,00	APBD

Gedangsari, 04 September 2025



Pihak Kedua

EKO KRISDIYANTO, SE

Pihak Kesatu

RINI WIDIASTUTI, SE



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON GEDANGSARI

ꦏꦤꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦒꦺꦢꦁꦱꦫꦶ

Jalan Ngalang KM 5 Gedangsari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55863
Laman gedangsari.gunungkidulkab.go.id; Posel gedangsari@gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AGUS NUGRAHA, S.Sos

Jabatan : Kepala Jawatan Sosial

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : EKO KRISDIYANTO, SE

Jabatan : Panewu Gedangsari

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gedangsari, 04 September 2025



Pihak Kedua

EKO KRISDIYANTO, SE

Pihak Kesatu

AGUS NUGRAHA, S.Sos

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KAPANEWON GEDANGSARI

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
		Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	
1. Kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon meningkat	Persentase KK Miskin yang tertangani	Persen	100
	Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan PD dan instansi vertikal terkait	laporan	2
	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang ditingkatkan kapasitasnya	lembaga	2
	Jumlah laporan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	laporan	2
	Jumlah dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan dengan pembangunan desa	dokumen	4
2. Pelestarian potensi ragam budaya lokal untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan	Jumlah laporan Gelar Budaya Yogyakarta	laporan	1

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1.	Koordinasi/Sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Rp. 5.391.000,00	APBD
2.	Peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan	Rp. 11.260.000,00	APBD
3.	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Rp. 12.750.000,00	APBD
4.	Fasilitasi dokumen sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan dengan pembangunan desa	Rp. 461.210.000,00	APBD
5.	Adat, Seni, tradisi dan lembaga budaya	Rp. 30.000.000,00	APBD

Gedangsari, 04 September 2025

Pihak Kedua

 EKO KRISDIYANTO, SE

Pihak Kesatu

 AGUS NUGRAHA, S.Sos



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON GEDANGSARI

ꦏꦁꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦏꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦒꦺꦢꦁꦱꦫꦶ

Jalan Ngalang KM 5 Gedangsari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55863
Laman gedangsari.gunungkidulkab.go.id; Posel gedangsari@gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUNARNO, S.IP

Jabatan : Kepala Jawatan Keamanan

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : EKO KRISDIYANTO, SE

Jabatan : Panewu Gedangsari

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gedangsari, 04 September 2025



Pihak Kedua

EKO KRISDIYANTO, SE

Pihak Kesatu

SUNARNO, S.IP

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KAPANEWON GEDANGSARI

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
		Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	
1. Kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon meningkat	Persentase penanganan ketentraman dan ketertiban umum	persen	100
	Jumlah Laporan hasil sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	laporan	2
	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional, dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian bhineka tunggal ika serta pemerintahan dan pemeliharaan negara kesatuan RI	orang	75
	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Dokumen	1
	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	dokumen	2

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Rp. 6.798.900,00	APBD
2	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bheneka Tunggal Ika sera pemertahankan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Rp. 77.512.900,00	APBD
3	Pelaksanaan Tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan	Rp. 8.480.000,00	APBD
4	Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Rp. 4.696.800,00	APBD



 Pihak Kedua
 EKO KRISDIYANTO, SE

Gedangsari, 04 September 2025

Pihak Kesatu

 SUNARNO, S.IP



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON GEDANGSARI

เทศบาลตำบลแก่งกระจาน

Jalan Ngalang KM 5 Gedangsari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55863
Laman gedangsari.gunungkidulkab.go.id; Posel gedangsari@gunungkidulkab.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NARDIYANTO, S.IP

Jabatan : Kepala Jawatan Praja

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu

Nama : EKO KRISDIYANTO, SE

Jabatan : Panewu Gedangsari

Selaku atasan langsung Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Gedangsari, 04 September 2025

Pihak Kedua



EKO KRISDIYANTO, SE

Pihak Kesatu

NARDIYANTO, S.IP

LAMPIRAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KAPANEWON GEDANGSARI

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
		Satuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	
1. Kualitas penyelenggaraan pemerintahan kapanewon meningkat	Persentase Penyusunan APBKal benar dan tepat waktu	Persen	100
	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa	dokumen	3
	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa	dokumen	8
	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	dokumen	22
	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa	dokumen	1
	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan pemilihan kepala desa	dokumen	0
	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa	dokumen	1
	Jumlah dokumen rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	dokumen	3

No	Kegiatan	Anggaran (Rp.)	Keterangan
1.	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	2.975.000,00	APBD
2.	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	3.160.000,00	APBD
3.	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	18.553.000,00	APBD
4.	Fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa	2.290.000,00	APBD
5.	Fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa	0,00	APBD
6.	Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa	750.000,00	APBD
7.	Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	1.620.000,00	APBD

Gedangsari, 04 September 2025

Pihak Kedua



EKO KRISDIYANTO, SE

Pihak Kesatu

NARDIYANTO, S.IP

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Latar Belakang Evaluasi

Latar belakang dilakukannya evaluasi AKIP internal Perangkat Daerah adalah untuk mengetahui sejauhmana implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Evaluasi AKIP internal ini diharapkan dapat mendorong setiap Perangkat Daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

3. Tujuan Evaluasi

Tujuan dilaksanakannya evaluasi AKIP internal adalah:

- a. memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
- b. menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
- e. memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

4. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi AKIP internal mencakup antara lain:

- a. penilaian kualitas perencanaan kinerja yang selaras yang akan dicapai untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan;
- b. penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja;
- c. penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya yang memberikan dampak besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya; dan
- d. penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (dampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

5. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang digunakan dalam evaluasi AKIP internal adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan).

Penilaian dilakukan pada komponen dan sub-komponen evaluasi AKIP internal, setiap sub-komponen dinilai berdasarkan kriteria pemenuhan dokumen, kualitas dan pemanfaatan. Setiap sub-komponen akan dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E, gambaran kriteria sesuai dengan gradasi nilai sebagai berikut:

a. Penilaian Keberadaan

Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan
AA	100	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 5 tahun terakhir.
A	90	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan telah dipertahankan dalam setidaknya 1 tahun terakhir.
BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional.

Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan
B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).
CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%).
C	50	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%).
D	30	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%).
E	0	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

b. Penilaian Kualitas dan Pemanfaatan

Pilihan Jawaban	Nilai	Penjelasan
AA	100	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat upaya inovatif serta layak menjadi percontohan secara nasional.
A	90	Jika seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) dan terdapat beberapa upaya yang bisa dihargai dari pemenuhan kriteria tersebut.
BB	80	Jika kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai dengan mandat kebijakan nasional.
B	70	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>75% - 100%).
CC	60	Jika kualitas sebagian besar kriteria telah terpenuhi (>50% - 75%).
C	50	Jika kualitas sebagian kecil kriteria telah terpenuhi (>25% - 50%).
D	30	Jika kriteria penilaian akuntabilitas kinerja telah mulai dipenuhi (>0% - 25%).
E	0	Jika sama sekali tidak ada upaya dalam pemenuhan kriteria penilaian akuntabilitas kinerja.

Setiap sub-komponen kriteria yang telah diberikan nilai dalam pemenuhan kriteria harus dilengkapi dengan catatan berupa keterangan beserta bukti daftar dokumen yang mendukung dan relevan.

Nilai pada sub-komponen yang telah terisi akan terakumulasi sehingga diperoleh nilai total (hasil akhir) di setiap komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP, dengan kategori predikat sebagai berikut:

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai >90–100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B (Nilai > 60 – 70)	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.

Predikat	Interpretasi
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C (Nilai > 30 – 50)	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

6. Gambaran Umum Perangkat Daerah

Kapanewon Gedangsari Kabupaten Gunungkidul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Sedangkan tugas pokok dan struktur organisasi Kapanewon Gedangsari Kabupaten Gunungkidul diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kapanewon.

Kapanewon Gedangsari Kabupaten Gunungkidul mempunyai tugas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon, perumusan

kebijakan umum di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan.

7. **Gambaran Umum Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
8. **Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya**
Berdasarkan Laporan Hasil Monitoring Nomor 700.1.2.7/SKIP/11 tanggal 16 Juli 2024 dan dokumen yang dilampirkan, Kapanewon Gedangsari Kabupaten Gunungkidul telah menindaklanjuti semua rekomendasi hasil evaluasi AKIP internal Tahun 2023.

B. GAMBARAN HASIL EVALUASI

Hasil evaluasi AKIP internal Kapanewon Gedangsari Kabupaten Gunungkidul menunjukkan bahwa nilai sebesar 81,44 dengan predikat A. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "Memuaskan" yaitu terdapat gambaran bahwa Perangkat Daerah dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.

Rincian hasil evaluasi internal tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2023	2024
1. Perencanaan Kinerja	30	25,26	24,40
2. Pengukuran Kinerja	30	23,00	24,35
3. Pelaporan Kinerja	15	12,78	11,84
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	19,85	20,85
Nilai Hasil Evaluasi	100	80,89	81,44
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A	A

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada Kapanewon Gedangsari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Perangkat Daerah telah menyusun dokumen perencanaan kinerja yang mencakup Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Dokumen Rencana Strategis (Renstra), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan, Dokumen Perjanjian Kinerja (PK), Dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), Dokumen Sasaran Kinerja Pegawai dan Dokumen Rencana Aksi atas Kinerja.

2. Pengukuran Kinerja

Kapanewon Gedangsari Kabupaten Gunungkidul telah melaksanakan pengukuran kinerja mencakup mekanisme pengukuran kinerja mulai dari pengumpulan data kinerja, keterlibatan pimpinan dalam mengukur capaian kinerja hingga pemanfaatannya.

3. Pelaporan Kinerja

Kapanewon Gedangsari Kabupaten Gunungkidul telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja Tahun 2024 mencakup pemenuhan pelaporan kinerja, penyampaian, publikasi, penyajian informasi kinerja dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan kinerja antara lain sebagai berikut:

- a. Dokumen Laporan Kinerja belum seluruhnya mengungkap informasi tentang pencapaian kinerja yaitu berupa data pendukung capaian kinerja; dan
- b. Pimpinan unit kerja belum sepenuhnya memantau seluruh pencapaian yang ada dalam laporan kinerja.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mencakup pemenuhan tindak lanjut hasil evaluasi internal dan pemanfaatan hasil evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan kinerja di masa yang akan datang.

Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam evaluasi akuntabilitas kinerja internal yaitu hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

C. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, kepada Kepala Kapanewon Gedangsari Kabupaten Gunungkidul terdapat beberapa hal yang disarankan/direkomendasikan untuk perbaikan di masa yang akan datang dan meningkatkan efektivitas penerapan akuntabilitas kinerja, yaitu:

a. Perencanaan Kinerja

Tidak terdapat rekomendasi

b. Pengukuran Kinerja

Tidak terdapat rekomendasi

c. Pelaporan Kinerja

- a. Dokumen Laporan Kinerja mengungkapkan informasi berupa data pendukung sebagai dasar penghitungan capaian kinerja; dan
- b. Pimpinan unit agar memantau seluruh pencapaian yang ada dalam laporan kinerja.

d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal agar dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

D. PENUTUP

1. Dorongan terhadap implementasi SAKIP yang lebih baik

Dalam rangka peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka Perangkat Daerah harus berkomitmen dan secara konsisten melakukan evaluasi untuk meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan target capaian kinerja yang telah direncanakan.

2. Apresiasi

Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul menyampaikan terima kasih atas bantuan dan kerjasama Kapanewon Gedangsari Kabupaten Gunungkidul atas kesediaannya memberikan data/dokumen yang diperlukan, sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan evaluasi.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kapanewon Gedangsari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024, mohon menjadikan periksa.



Tembusan;

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan); dan
2. Panewu Gedangsari Kabupaten Gunungkidul.



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
INSPEKTORAT DAERAH

ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ - ꦲꦩꦗꦶꦤꦶꦠ

Jalan Taman Bhakti 2B Wonosari Gunungkidul 55812

Telepon (0274) 391539, Faksimile (0274) 391539

Posel: inspektorat@gunungkidulkab.go.id, Laman: inspektorat.gunungkidulkab.go.id

Wonosari, 7 Juli 2025


Nomor : 700-1-2-7 / TL - AKIP / 138
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 bendel
Hal : Laporan Hasil Monitoring Tindak
Lanjut Laporan Hasil Evaluasi
(LHE) AKIP Internal Tahun 2024
pada Kapanewon Gedangsari
Kabupaten Gunungkidul

Yth. Bupati Gunungkidul
di
Wonosari

Berdasarkan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 305/KPTS/2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Tahun 2025 dan Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14/ITDA-Monev/VI/2025 tanggal 10 Juni 2025 kami telah melaksanakan monitoring atas tindak lanjut LHE AKIP Internal Tahun 2024 yang dilaksanakan mulai tanggal 10 Juni sampai dengan 20 Juni 2025 pada Kapanewon Gedangsari Kabupaten Gunungkidul.

Adapun hasil monitoring atas tindak lanjut LHE AKIP Internal Tahun 2024, kami sampaikan sebagaimana terlampir.

Demikian Laporan ini kami sampaikan, mohon menjadikan periksa.

Inspektur,

Saptoyo, S.Sos, M.Si.
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP 197103251991011001

Tembusan:




1. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul; dan
2. Panewu Gedangsari Kabupaten Gunungkidul.

Lampiran Surat Inspektur Daerah
 Nomor: 700.1.1.2.7 / TL-AKIP / 138
 Tanggal: 2 Juli 2025

**HASIL MONITORING ATAS TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI (LHE) AKIP INTERNAL TAHUN 2024
 PADA KAPANEWON GEDANGSARI KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

No.	Catatan	Rekomendasi	Bukti Tindak Lanjut yang diperlukan	Bukti Tindak Lanjut yang disajikan	Status Tindak Lanjut
	PERENCANAAN KINERJA				
1.	Tidak Terdapat catatan hasil evaluasi	Tidak ada rekomendasi	-	-	-
	PENGUKURAN KINERJA				
2.	Tidak Terdapat catatan hasil evaluasi	Tidak ada rekomendasi	-	-	-
	PELAPORAN KINERJA				
3.	a. Dokumen Kinerja Laporan belum seluruhnya mengungkap informasi tentang pencapaian kinerja yaitu berupa data pendukung capaian kinerja; dan b. Pimpinan unit kerja belum sepenuhnya memantau seluruh	a. Dokumen Laporan Kinerja mengungkap informasi berupa data pendukung sebagai dasar penghitungan capaian kinerja; dan b. Pimpinan unit agar seluruh pencapaian yang ada	a. Laporan kinerja Tahun 2025 mengungkap informasi berupa data dukung sebagai dasar penghitungan capaian kinerja; b. Bukti bahwa pimpinan unit telah memantau seluruh pencapaian yang	a. Surat Kesanggupan Panewu Gedangsari Kabupaten Gunungkidul untuk mengungkapkan informasi berupa data pendukung yang memadai sebagai dasar penghitungan capaian kinerja dalam Laporan	Tindaklanjutan dalam proses penyelesaian sesuai rekomendasi.

No.	Catatan	Rekomendasi	Bukti Tindak Lanjut yang diperlukan	Bukti Tindak Lanjut yang disajikan	Status Tindak Lanjut
	pencapaian yang ada dalam laporan kinerja	dalam laporan kinerja.	ada dalam Laporan Kinerja (Laporan Kinerja Tahun 2025);	Kinerja selanjutnya. b. Surat Pernyataan Kesanggupan Panewu Gedangsari Kabupaten Gunungkidul untuk memantau seluruh pencapaian yang ada dalam laporan kinerja.	
EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL					
4.	Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal agar dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja	Laporan Hasil Monitoring Tindaklanjuti Hasil Evaluasi AKIP 2024.	Surat Kesanggupan Panewu Gedangsari Kabupaten Gunungkidul untuk memanfaatkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dalam perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja	Tindaklanjuti dalam proses penyelesaian sesuai rekomendasi.


 Inspektur, 
 Saptoyo, S.Sos, M.Si.
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP 197103251991011001



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON GEDANGSARI

ꦏꦧꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭꦒꦺꦢꦁꦱꦫꦶ

Jalan Ngalang KM 5 Gedangsari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55863
Laman gedangsari.gunungkidulkab.go.id; Posel gedangsari@gunungkidulkab.go.id

Gedangsari, 16 April 2025

Nomor : B/700.1.2.7/241/2025
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Yth. Inspektur Daerah
Kabupaten Gunungkidul
di
Wonosari

Menindaklanjuti laporan dari Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul nomor: 700.1.2.7/EV-LKJ/48 tanggal 27 Maret 2024 perihal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kapanewon Gedangsari Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024, maka bersama ini kami sampaikan tanggapan atas hasil evaluasi sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Panewu Gedangsari,



Eko Krisdiyanto, SE.
Pembina, IV/a
NIP 197506301995031001

Tembusan:

1. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul

Lampiran Surat
Nomor : B/700.1.2.7/241/2025
Tanggal : 16 April 2025

TINDAK LANJUT ATAS CATATAN REKOMENDASI EVALUASI AKIP
TAHUN 2024

PD : Kapanewon Gedangsari

No	Kondisi	Catatan	Rekomendasi	Konfirmasi Tindak Lanjut
a	Perencanaan Kinerja	Tidak terdapat rekomendasi	Tidak terdapat rekomendasi	-
b	Pengukuran Kinerja	Tidak terdapat rekomendasi	Tidak terdapat rekomendasi	-
c	Pelaporan Kinerja	<ol style="list-style-type: none">1. Dokumen laporan kinerja belum seluruhnya mengungkap informasi tentang pencapaian kinerja yaitu berupa data pendukung capaian kinerja; dan2. Pimpinan unit kerja belum sepenuhnya memantau seluruh pencapaian yang ada dalam laporan kinerja.	<ol style="list-style-type: none">1. Dokumen laporan kinerja mengungkapkan informasi berupa data pendukung sebagai dasar penghitungan capaian kinerja; dan2. Pimpinan unit agar memantau seluruh pencapaian yang ada dalam laporan kinerja.	Akan ditindaklanjuti sesuai rekomendasi
d	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.	Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal agar dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.	Akan ditindaklanjuti sesuai rekomendasi

Panewu Gedangsari,



Eko Krisdiyanto, SE.
Pembina, IV/a
NIP 197506301995031001



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON GEDANGSARI

ꦏꦥꦤꦺꦮꦸꦒꦺꦢꦁꦱꦫꦶ

Jalan Ngalang KM 5 Gedangsari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55863
Laman gedangsari.gunungkidulkab.go.id; Posel gedangsari@gunungkidulkab.go.id

SURAT PERNYATAAN
NOMOR B/000.8.7.3/3/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eko Krisdiyanto, SE
Jabatan : Panewu Gedangsari
Pangkat/Golongan : Pembina, IV/a
NIP : 197506301995031001

Dengan ini menyatakan bahwa kami sanggup menindaklanjuti hasil rekomendasi Evaluasi AKIP Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam dokumen tindak lanjut atas catatan rekomendasi evaluasi AKIP, yaitu:

1. Melengkapi dokumen laporan kinerja agar mengungkapkan informasi yang memadai terkait pencapaian kinerja, termasuk data pendukung sebagai dasar perhitungan capaian kinerja.
2. Melakukan pemantauan secara optimal oleh pimpinan unit kerja terhadap seluruh capaian kinerja yang tercantum dalam laporan kinerja.
3. Memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal sebagai bahan perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Demikian surat pernyataan kesanggupan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gedangsari, 05 Maret 2026

Panewu Gedangsari,



Eko Krisdiyanto, SE.
Pembina, IV/a
NIP 197506301995031001

**RENCANA AKSI PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA
KAPANEWON GEDANGSARI
TAHUN 2025**

No	Sasaran Strategis	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Subkegiatan	Target	Target Kinerja Sasaran, Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan												Penanggung Jawab Program/Kegiatan/ Subkegiatan		
						TRIWULAN 1		TRIWULAN 2		TRIWULAN 3		TRIWULAN 4		Rp	target	Rp	target		Rp	target
						target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp							
1	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kapanewon meningkat	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
				Indeks Pelayanan Kapanewon			73.395.000		81.116.300		586.419.300	81	39.484.500							
				Penyusunan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan penataan publik terkonsasi	100 Persen	14,11 Persen	7.372.500	22,04 Persen	11.516.500	31,78 Persen	16.607.500	32,07 Persen	16.754.500							
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 laporan	0 laporan	0	1 laporan	3.034.000	1 laporan	7.180.000	1 laporan	4.067.000							
				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 laporan	0 laporan	0	1 laporan	3.034.000	1 laporan	7.180.000	1 laporan	4.067.000	Jawatan Sosial						
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	13 laporan	3 laporan	7.372.500	3 laporan	8.482.500	3 laporan	9.427.500	4 laporan	12.887.500							
				Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	13 laporan	3 laporan	7.372.500	3 laporan	8.482.500	3 laporan	9.427.500	4 laporan	12.887.500	Jawatan Pelayanan Umum						
				PROGRAM PERBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	100 Persen	40,18 Persen	30.222.500	28,48 Persen	21.420.000	18,29 Persen	13.760.000	13,05 Persen	9.920.000	Panewu						
				Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	20 laporan	4 laporan	24.702.500	6 laporan	17.620.000	4 laporan	5.340.000	6 laporan	3.290.000							
				Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kecamatan	11 dokumen	1 dokumen	16.612.500	3 dokumen	16.150.000	4 dokumen	5.340.000	3 dokumen	1.050.000	Jawatan Kemakmuran						
				Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	9 laporan	3 laporan	8.090.000	3 laporan	1.470.000	0 laporan	0	3 laporan	2.240.000	Jawatan Kemakmuran						
				Meningkatnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6 laporan	2 laporan	5.520.000	2 laporan	3.800.000	1 laporan	8.420.000	1 laporan	6.530.000							
				Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	2 lembaga kemasyarakatan	1 lembaga kemasyarakatan	2.750.000	1 lembaga kemasyarakatan	2.750.000	0 lembaga kemasyarakatan	2.810.000	0 lembaga kemasyarakatan	2.950.000	Jawatan sosial						
				Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 laporan	1 laporan	2.770.000	1 laporan	1.050.000	1 laporan	5.610.000	1 laporan	3.580.000	Jawatan Kemakmuran						
				PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM																
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 Persen	75,41 Persen	16.280.000	9,40 Persen	1.810.000	9,00 Persen	1.943.900	7,20 Persen	1.555.000	Panewu						
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Terana Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 laporan	1 laporan	2.070.000	0 laporan	1.510.000	0 laporan	1.943.900	1 laporan	1.555.000	Jawatan Keamanan						
				Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 laporan	1 laporan	14.210.000	0 laporan	300.000	1 laporan	0	0 laporan	0	Jawatan Sosial						

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 dokumen	0 dokumen	0 dokumen	1.005.000	0 dokumen	0	0 dokumen	0 Subbag PK
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 dokumen	2 dokumen	1.154.000	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0 Subbag PK
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 dokumen	0 dokumen	0	823.000	0 dokumen	0	0 dokumen	0 Subbag PK
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	17 dokumen	5 dokumen	916.300	497.900	4 dokumen	987.900	4 dokumen	497.900 Subbag PK
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 laporan	1 laporan	580.000	1.074.900	1 laporan	560.000	1 laporan	1.045.000 Subbag Umum
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatkan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	26 laporan	7 laporan	517.373.453	413.544.882	6 laporan	306.754.596	6 laporan	70.869.547
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	262 orang/bulan	63 orang/bulan	514.016.353	411.234.882	63 orang/bulan	304.534.596	63 orang/bulan	68.529.547 Subbag PK
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 laporan	1 laporan	1.204.100	0	0 laporan	0	0 laporan	0 Subbag PK
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	13 laporan	3 laporan	2.150.000	2.310.000	3 laporan	2.220.000	3 laporan	1.740.000 Subbag PK
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatkan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6 dokumen	1 dokumen	713.700	1.135.700	2 dokumen	713.700	1 dokumen	658.700
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatkan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang baik	293 laporan	77 laporan	37.446.500	9.292.500	71 laporan	5.823.500	71 laporan	9.078.000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2 paket	1 paket	1.069.500	0	0 paket	939.500	0 paket	0 Subbag Umum
Penyediaan Peralatan dan Peralengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Peralengkapan Kantor	6 paket	2 paket	31.406.000	7.082.500	2 paket	0	2 paket	6.918.000 Subbag Umum
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	4 paket	2 paket	1.710.000	0	0 paket	1.690.000	0 paket	0 Subbag Umum
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	5 paket	3 paket	1.140.000	0	0 paket	1.134.000	0 paket	0 Subbag Umum
Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Penyediaan Bahan Baku dan Peraturan Perundang-undangan	248 dokumen	62 dokumen	300.000	300.000	62 dokumen	300.000	62 dokumen	300.000
Penyediaan Fasilitas Kurungan Tamu	Tersedianya Fasilitas Kurungan Tamu	12 laporan	3 laporan	540.000	540.000	3 laporan	540.000	3 laporan	540.000 Subbag Umum
Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	16 laporan	4 laporan	1.290.000	1.370.000	4 laporan	1.220.000	4 laporan	1.320.000 Subbag Umum
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usahan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Usahan Pemerintah Daerah	1 unit	32 unit	7.300.000	0	0 unit	0	0 unit	0
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	1 unit	30 unit	7.300.000	0	0 unit	0	0 unit	0 Subbag Umum
Penyediaan Jasa Penunjang Usahan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Usahan Pemerintahan Daerah	36 laporan	9 laporan	6.486.480	6.486.480	9 laporan	6.486.480	10 laporan	6.486.480
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	36 laporan	9 laporan	6.336.480	6.336.480	9 laporan	6.336.480	9 laporan	6.336.480 Subbag Umum
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	1 laporan	0 laporan	150.000	150.000	0 laporan	150.000	1 laporan	150.000 Subbag Umum
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usahan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Usahan Pemerintahan Daerah	122 unit	29 unit	20.065.500	102.754.450	30 unit	18.030.000	34 unit	20.862.000

	Penelitian Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terdapatnya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	106 unit	26 unit	12.293.000	26 unit	7.750.000	26 unit	7.900.000	28 unit	7.957.000	Subag Umum
	Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Teraksananya Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 unit	2 unit	1.800.000	2 unit	3.150.000	3 unit	3.000.000	3 unit	2.250.000	Subag Umum
	Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Teraksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	0 unit	5.372.500	1 unit	91.253.450	0 unit	7.130.000	1 unit	9.655.000	Subag Umum
	Pemeliharaan Rehabilitasi Sana dan Prasana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Teraksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sana dan Prasana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sana dan Prasana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 unit	1 unit	600.000	1 unit	600.000	0 unit	0	2 unit	600.000	Subag Umum
3	Pekastaran Pokans Ragam Budaya Lokal untuk Meningkatkan Ekonomi Kerakyatan	TERAKSANYA PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Jumlah Pokans Budaya Lokal Yang Diastakan	0	0	8.420.000	0	12.830.000	2	71.885.000	0	6.865.000	
	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	TERAKSANYA PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	Penastase program penyelenggaraan keistimewaan Yogyakarta urusan kebudayaan terfallastasi	100 Persen	0	0	0	0	100	60.000.000	0	0	
	Ged. Budaya Baga	Teraksananya Cagar Budaya Yogyakarta	Jumlah Laporan Cagar Budaya Yogyakarta	1 laporan	0	0	0	0	1	60.000.000	0	0	Jawatan Sosial
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAAN DAN KETATALAKSANAAN	TERAKSANYA PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAAN DAN KETATALAKSANAAN	Penastase penyelenggaraan keistimewaan urusan Kelembagaan dan Metabalastasaan	100 Persen	21,05	8.420.000	32,08	12.830.000	29,71	11.885.000	17,16	6.865.000	Panewu
	Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Teraksananya Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	Jumlah dokumen Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Keistimewaan	3 dokumen	0	8.420.000	1	12.830.000	0	11.885.000	1	6.865.000	
	Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kabupaten/Kota dan Kecamatan	Teraksananya Penerapan dan Pendampingan Keistimewaan di Kabupaten/Kota dan Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Keistimewaan di Kabupaten/Kota dan Kecamatan	3 dokumen	0	8.420.000	1	12.830.000	1	11.885.000	1	6.865.000	Jawatan Kemakmuran
		Jumlah				616.977.733		612.924.112		997.660.476		155.670.127	
		TOTAL						2.443.232.448					

Gedangsari, Januari 2025
 PANEWU GEDANGSARI,

 EKO KRISDIYANTO, SE
 NIP. 197506301995031001

No	Nama Kegiatan	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Sasaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Utama, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Tercapai dan Berprestasi												Penyempurnaan Program/Kegiatan/ Subkegiatan
					TERRAS LAM I			TERRAS LAM 2			TERRAS LAM 3			TERRAS LAM 4			
					TARGET	Rp	target	TARGET	Rp	target	TARGET	Rp	target	TARGET	Rp	target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
		Koordinasi dan Penyusunan Perencanaan (PPL) SPTD dan Laporan Hasil Pelaksanaan Perencanaan (PPL) SPTD	Terdapatnya Dokumen Perencanaan (PPL) SPTD dan Laporan Hasil Pelaksanaan Perencanaan (PPL) SPTD	Jumlah Dokumen Perencanaan (PPL) SPTD dan Laporan Hasil Pelaksanaan Perencanaan (PPL) SPTD	2 dokumen	0 dokumen	641.000	0	0 dokumen	0	0 dokumen	0	0	Sesuai PK			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja (SKP) dan Laporan Hasil Pelaksanaan Perencanaan (PPL) SPTD dan Laporan Hasil Pelaksanaan Perencanaan (PPL) SPTD	Terdapatnya Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja (SKP) dan Laporan Hasil Pelaksanaan Perencanaan (PPL) SPTD dan Laporan Hasil Pelaksanaan Perencanaan (PPL) SPTD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi Kinerja (SKP) dan Laporan Hasil Pelaksanaan Perencanaan (PPL) SPTD dan Laporan Hasil Pelaksanaan Perencanaan (PPL) SPTD	17 dokumen	0 dokumen	371.900	4 dokumen	387.500	4 dokumen	387.500	4 dokumen	667.000	Sesuai PK			
		Evaluasi Kinerja Persekolahan Dasar	Terdapatnya Evaluasi Kinerja Persekolahan Dasar	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Persekolahan Dasar	4 laporan	1 laporan	1.034.000	1 laporan	140.000	1 laporan	140.000	1 laporan	622.000	Sesuai Uraian			
		Administrasi Keuangan Persekolahan Dasar	Meningkatkannya Administrasi Keuangan Persekolahan Dasar	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Persekolahan Dasar	26 laporan	7 laporan	412.847.423	6 laporan	254.914.489	7 laporan	254.914.489	8 laporan	2.487.841	Sesuai PK			
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji yang Dibayarkan (Gaji dan Tunjangan) ASN	252 orang/bulan	83 orang/bulan	410.027.423	83 orang/bulan	222.584.200	83 orang/bulan	222.584.200	83 orang/bulan	2.861.141	Sesuai PK			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Alokasi Tahun SPTD	Terdapatnya Laporan Keuangan Alokasi Tahun SPTD dan Laporan Hasil Pelaksanaan Perencanaan (PPL) SPTD dan Laporan Hasil Pelaksanaan Perencanaan (PPL) SPTD	Jumlah Laporan Keuangan Alokasi Tahun SPTD dan Laporan Hasil Pelaksanaan Perencanaan (PPL) SPTD dan Laporan Hasil Pelaksanaan Perencanaan (PPL) SPTD	13 laporan	3 laporan	2.180.000	3 laporan	1.930.000	4 laporan	1.930.000	3 laporan	1.530.000	Sesuai PK			
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Subunit/Instansi/Struktur Organisasi SPTD	Terdapatnya Laporan Keuangan Subunit/Instansi/Struktur Organisasi SPTD	Jumlah Laporan Keuangan Subunit/Instansi/Struktur Organisasi SPTD	8 dokumen	1 dokumen	1.138.700	2 dokumen	713.700	1 dokumen	713.700	1 dokumen	688.700	Sesuai Uraian			
		Administrasi Pengadaan Persekolahan Dasar	Meningkatkannya Administrasi Pengadaan Persekolahan Dasar	Jumlah Dokumen Administrasi Pengadaan Persekolahan Dasar	8 dokumen	1 dokumen	1.138.700	2 dokumen	713.700	1 dokumen	713.700	1 dokumen	688.700	Sesuai Uraian			
		Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Jumlah Laporan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	263 laporan	77 laporan	2.725.000	74 laporan	4.340.000	74 laporan	4.340.000	74 laporan	8.479.000	Sesuai Uraian			
		Administrasi Umum Persekolahan Dasar	Terdapatnya Komponen Intai/Leleh/Persekolahan Sarung Kobar	Jumlah Paket Korporasi Intai/Leleh/Persekolahan Sarung Kobar	2 paket	1 paket	1.000.000	0 paket	828.000	1 paket	828.000	0 paket	0	Sesuai Uraian			
		Perencanaan Persekolahan Dasar	Terdapatnya Persekolahan Dasar	Jumlah Paket Persekolahan Dasar	8 paket	2 paket	3.122.520	2 paket	1.000.000	0 paket	1.000.000	2 paket	6.899.000	Sesuai Uraian			
		Perencanaan Persekolahan Dasar	Terdapatnya Persekolahan Dasar	Jumlah Paket Persekolahan Dasar	4 paket	2 paket	1.710.000	0 paket	873.000	2 paket	873.000	0 paket	0	Sesuai Uraian			
		Perencanaan Persekolahan Dasar	Terdapatnya Persekolahan Dasar	Jumlah Paket Persekolahan Dasar	6 paket	2 paket	1.140.000	0 paket	873.000	2 paket	873.000	0 paket	0	Sesuai Uraian			
		Perencanaan Persekolahan Dasar	Terdapatnya Persekolahan Dasar	Jumlah Paket Persekolahan Dasar	242 dokumen	82 dokumen	200.000	82 dokumen	200.000	82 dokumen	200.000	82 dokumen	200.000	Sesuai Uraian			
		Perencanaan Persekolahan Dasar	Terdapatnya Persekolahan Dasar	Jumlah Laporan Persekolahan Dasar	12 laporan	3 laporan	940.000	3 laporan	940.000	3 laporan	940.000	3 laporan	940.000	Sesuai Uraian			
		Perencanaan Persekolahan Dasar	Terdapatnya Persekolahan Dasar	Jumlah Laporan Persekolahan Dasar	16 laporan	4 laporan	1.370.000	4 laporan	1.370.000	4 laporan	1.370.000	4 laporan	1.370.000	Sesuai Uraian			
		Perencanaan Persekolahan Dasar	Terdapatnya Persekolahan Dasar	Jumlah Laporan Persekolahan Dasar	1 unit	0 unit	1.300.000	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	Sesuai Uraian			
		Perencanaan Persekolahan Dasar	Terdapatnya Persekolahan Dasar	Jumlah Laporan Persekolahan Dasar	1 unit	0 unit	1.300.000	0 unit	0	0 unit	0	0 unit	0	Sesuai Uraian			
		Perencanaan Persekolahan Dasar	Terdapatnya Persekolahan Dasar	Jumlah Laporan Persekolahan Dasar	26 laporan	9 laporan	6.488.480	9 laporan	6.488.480	9 laporan	6.488.480	10 laporan	6.488.480	Sesuai Uraian			
		Perencanaan Persekolahan Dasar	Terdapatnya Persekolahan Dasar	Jumlah Laporan Persekolahan Dasar	30 laporan	9 laporan	6.236.400	9 laporan	6.236.400	9 laporan	6.236.400	9 laporan	6.236.400	Sesuai Uraian			
		Perencanaan Persekolahan Dasar	Terdapatnya Persekolahan Dasar	Jumlah Laporan Persekolahan Dasar	1 laporan	0 laporan	150.000	0 laporan	150.000	0 laporan	150.000	1 laporan	150.000	Sesuai Uraian			
		Perencanaan Persekolahan Dasar	Terdapatnya Persekolahan Dasar	Jumlah Laporan Persekolahan Dasar	522 unit	20 unit	191.128.800	20 unit	19.228.800	20 unit	19.228.800	24 unit	20.382.000	Sesuai Uraian			
		Perencanaan Persekolahan Dasar	Terdapatnya Persekolahan Dasar	Jumlah Laporan Persekolahan Dasar	108 unit	20 unit	7.250.300	20 unit	7.990.300	20 unit	7.990.300	20 unit	7.990.300	Sesuai Uraian			
		Perencanaan Persekolahan Dasar	Terdapatnya Persekolahan Dasar	Jumlah Laporan Persekolahan Dasar	112 unit	2 unit	3.180.000	2 unit	3.000.000	2 unit	3.000.000	3 unit	2.261.000	Sesuai Uraian			
		Perencanaan Persekolahan Dasar	Terdapatnya Persekolahan Dasar	Jumlah Laporan Persekolahan Dasar	2 unit	0 unit	89.643.900	0 unit	7.300.000	0 unit	7.300.000	1 unit	9.403.000	Sesuai Uraian			

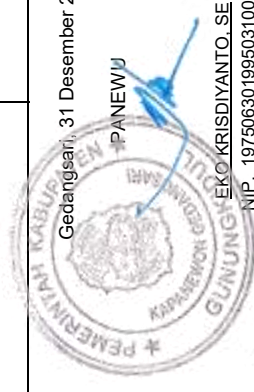
FORMULIR A2

LAPORAN KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT
BULAN DESEMBER TAHUN ANGGARAN 2025

PD : KAPANEWON GEDANGSARI
No DPA : A.1/7.01.0.00.0.15.0000/001/2025

NO	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Capaian Fisik		Kendala	Tindak lanjut yang diperlukan	Pihak yang diharapkan dapat membantu penyelesaian masalah		
			Target	Realisasi					
			Narasi	%					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		100,00		75,27	sisa belanja mbiz	sisa belanja tidak bisa dikembalikan dan menjadi silpa	- Panewu Anom - Kasubbag Umum

Jumlah Sub Kegiatan dengan deviasi fisik >5% sebanyak 1 Sub Kegiatan



Gedangsari, 31 Desember 2025

EKO KRISDIYANTO, SE
NIP. 197506301995031001



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bappeda Kabupaten Gunungkidul

Jl. Satria No.3, Wonosari, Gunungkidul, D.I. Yogyakarta (55812)

Telepon : (0274) 391761, Faksimile : (0274) 391701

Laman : bappeda.gunungkidulkab.go.id, Pos-el : bappeda@gunungkidulkab.go.id,

BERITA ACARA

Nomor : 000.7.2.41146/2025

Pada hari ini kamis tanggal sepuluh bulan april tahun dua ribu dua puluh lima, kami masing-masing:

1. Nama : MURDIYANA, SE
NIP : 196905311991031003
Pangkat/Gol : Penata Tingkat I, III/d
Jabatan : Tim Kerja Pengendalian dan Evaluasi
Alamat : Bappeda Kabupaten Gunungkidul
yang selanjutnya disebut Pihak Kesatu
2. Nama : SUNARDI, S.IP
NIP : 196905141993031002
Pangkat/Gol : Penata Tk. I, III/d
Jabatan : Plt. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
Alamat : Kapanewon Gedangsari
yang selanjutnya disebut Pihak Kedua, telah melaksanakan Desk Evaluasi Capaian Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Triwulan I Tahun 2025 dengan kesepakatan sebagai berikut:

- a. Pagu RPJMD Periode 2021-2026 Rp 18.022.922.289,00
- b. Capaian RKPD sampai dengan Tahun 2024 Rp 8.273.423.705,00
- c. Pagu Anggaran RKPD Tahun 2025 sebesar Rp 2.345.564.432,00
- d. Capaian kinerja RKPD sebesar 21.44%
- e. Capaian keuangan RKPD sebesar 20.6% atau Rp 483.115.468,00
- f. Capaian kinerja RPJMD sebesar 64.04%
- g. Capaian keuangan RPJMD sebesar 48.59% atau Rp 8.756.539.173,00
- h. Rincian capaian kinerja dan keuangan RKPD dan RPJMD terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap dua untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua

SUNARDI, S.IP
Penata Tk. I, III/d
NIP. 196905141993031002

Dibuat di : Wonosari
Pihak Kesatu

MURDIYANA, SE
Penata Tingkat I, III/d
NIP.196905311991031003

Mengetahui/Mengesahkan
Kepala Bappeda

MOHAMAD ARIF ALDIAN, S.IP., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.197502221993111001



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Wahana Pembangunan yang Berkeadilan

Jl. Satria No.3, Wonosari, Gunungkidul, D.I. Yogyakarta (55812)

Telepon : (0274) 391761, Faksimile : (0274) 391701

Laman : bappeda.gunungkidulkab.go.id, Pos-ef : bappeda@gunungkidulkab.go.id,

BERITA ACARA

Nomor : 000.7.2.4/1951/2025

Pada hari ini kamis tanggal sepuluh bulan juli tahun dua ribu dua puluh lima, kami masing-masing:

1. Nama : MURDIYANA, SE
 NIP : 196905311991031003
 Pangkat/Gol : Penata Tingkat I, III/d
 Jabatan : Ketua Tim Kerja Pengendalian dan Evaluasi
 Alamat : Bappeda Kabupaten Gunungkidul
 yang selanjutnya disebut Pihak Kesatu
2. Nama : SUNARDI, S.IP
 NIP : 196905141993031002
 Pangkat/Gol : Penata Tk. I, III/d
 Jabatan : Plt. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
 Alamat : Kapanewon Gedangsari
 yang selanjutnya disebut Pihak Kedua, telah melaksanakan Desk Evaluasi Capaian Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Triwulan II Tahun 2025 dengan kesepakatan sebagai berikut:
 - a. Pagu RPJMD Periode 2021-2026 Rp 18.022.922.289,00
 - b. Capaian RKPD sampai dengan Tahun 2024 Rp 8.273.423.705,00
 - c. Pagu Anggaran RKPD Tahun 2025 sebesar Rp 2.345.564.432,00
 - d. Capaian kinerja RKPD sebesar 40.75%
 - e. Capaian keuangan RKPD sebesar 42.72% atau Rp 1.002.023.642,00
 - f. Capaian kinerja RPJMD sebesar 51.46%
 - g. Capaian keuangan RPJMD sebesar 48.59% atau Rp 9.275.447.347,00
 - h. Rincian capaian kinerja dan keuangan RKPD dan RPJMD terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap dua untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua

SUNARDI, S.IP
 Penata Tk. I, III/d
 NIP. 196905141993031002

Dibuat di : Wonosari

Pihak Kesatu

MURDIYANA, SE
 Penata Tingkat I, III/d
 NIP.196905311991031003

Mengetahui/Mengesahkan
 Kepala Bappeda

MOHAMAD ARIF ALDIAN, S.IP., M.Si
 Pembina Utama Muda, IV/c
 NIP. 197502221993111001



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bappeda Kabupaten Gunungkidul

Jl. Satria No.3, Wonosari, Gunungkidul, D.I. Yogyakarta (55812)

Telepon : (0274) 391761, Faksimile : (0274) 391701

Laman : bappeda.gunungkidulkab.go.id, Pos-el : bappeda@gunungkidulkab.go.id,

BERITA ACARA

Nomor : 000.7.2.4/2772/2025

Pada hari ini Kamis tanggal sembilan bulan oktober tahun dua ribu dua puluh lima, kami masing-masing:

1. Nama : MURDIYANA, SE
NIP : 196905311991031003
Pangkat/Gol : Penata Tingkat I, III/d
Jabatan : Ketua Tim Kerja Pengendalian dan Evaluasi
Alamat : Bappeda Kabupaten Gunungkidul
yang selanjutnya disebut Pihak Kesatu
2. Nama : SUHIRMAN, S.IP
NIP : 197209062007011027
Pangkat/Gol : Penata, III/c
Jabatan : Plt. Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
Alamat : Kapanewon Gedangsari
yang selanjutnya disebut Pihak Kedua, telah melaksanakan Desk Evaluasi Capaian Hasil Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Triwulan III Tahun 2025 dengan kesepakatan sebagai berikut:

- a. Pagu RPJMD Periode 2021-2026 Rp 18.022.922.289,00
- b. Capaian RKPD sampai dengan Tahun 2024 Rp 8.273.423.705,00
- c. Pagu Anggaran RKPD Tahun 2025 sebesar Rp 2.212.356.154,00
- d. Capaian kinerja RKPD sebesar 82.38%
- e. Capaian keuangan RKPD sebesar 65.12% atau Rp 1.440.643.086,00
- f. Capaian kinerja RPJMD sebesar 76.23%
- g. Capaian keuangan RPJMD sebesar 53.9% atau Rp 9.714.066.791,00
- h. Rincian capaian kinerja dan keuangan RKPD dan RPJMD terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap dua untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua

SUHIRMAN, S.IP
Penata, III/c
NIP. 197209062007011027

Dibuat di : Wonosari

Pihak Kesatu

MURDIYANA, SE
Penata Tingkat I, III/d
NIP.196905311991031003

Mengetahui/Mengesahkan
Kepala Bappeda



MOHAMAD ARIF ALDIAN, S.IP., M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.197502221993111001

Kode	Kategori Anggaran	Keterangan Anggaran	Kategori Anggaran	Keterangan Anggaran	Anggaran 2014 (Rp)		Anggaran 2015 (Rp)		Anggaran 2016 (Rp)		Anggaran 2017 (Rp)	Anggaran 2018 (Rp)	Anggaran 2019 (Rp)	Anggaran 2020 (Rp)	Anggaran 2021 (Rp)	Anggaran 2022 (Rp)	Anggaran 2023 (Rp)	Anggaran 2024 (Rp)
					1	2	3	4	5	6								
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

Ditandatangani dan Disahkan
 oleh Kepala Dinas
 Kabupaten Bantul
 pada tanggal 15 Mei 2024
 di Bantul.

Ditandatangani dan Disahkan
 oleh Kepala Dinas
 Kabupaten Bantul
 pada tanggal 15 Mei 2024
 di Bantul.

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS PADJARAN

No	Nama Kegiatan	Kategori Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Tgl Pelaksanaan	Tgl Kegiatan												Maksimal Budget/Item												Total Budget/Item	Status	Keterangan
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12



**KAPANEWON GEDANGSARI
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**